

SKRIPSI

ANALISIS PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR (Studi Kasus Pada SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir)

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat – Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



OLEH :

YESI SUKESI

NIM. 10875003110

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2012**

ABSTRAK

ANALISIS PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR (Studi Kasus Pada Smpn 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir)

**Oleh :
YESI SUKESI**

Pengawasan diartikan sebagai suatu proses pengamatan dari seluruh kegiatan instansi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawas yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan untuk mengetahui bagaimana hubungan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan terhadap prosentase kelulusan siswa sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam penelitian ini hipotesis yang dikemukakan adalah diduga pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar berpengaruh terhadap tingkat kelulusan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan yang sifatnya mendukung dan menjelaskan hasil penelitian dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik. Dan pengawasan yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap tingkat kelulusan siswa khususnya siswa Sekolah Lanjutan Tingkat pertama. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan siswa dari tahun-ketahun mengalami peningkatan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah pada kesempatan ini, penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR (Studi Kasus Pada SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir)”**.

Skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya bantuan dan sumbangan pikiran serta tenaga dari berbagai pihak yang telah membantu. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda (Kadi) dan Ibunda (Alm Sumiyam) tercinta, kasihmu tiada bertepi, do'amu dan restumu adalah pembuka jalan hidup-Qu, keringat mana lagi yang engkau teteskan untuk anakmu ini. Anakmu hanya mampu berdo'a agar ayahanda dan ibunda dapat lindungan dari Allah SWT.
2. Kepada adik-adik-Qu yang tercinta (Suwandi Gontoro dan Kartini), jangan biarkan harimu berlalu tanpa arti, persiapkan diri untuk menyambut hari yang akan datang. Serta segenap keluarga besar-Qu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana mereka semua tidak bosan-bosannya memberikan motivasi dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. M. Nazir Karim, MA. Selaku pimpinan.
4. Bapak Mahendra Romus, M.Ec., P.hD selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Bapak Drs. Almasri M.Si, Selaku ketua jurusan Administrasi Negara
6. Bapak Rusdi S.Sos, MA, Selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara
7. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriah, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi masukan, dan meluangkan waktunya, serta memberi arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya pada Jurusan Administrasi Negara selama perkuliahan.
9. Kepada pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Drs Zulkifli S selaku ketua koordinator pengawas, Bapak Bajuri, Spd. Msi selaku Kabag Umum dan Kepegawaian, Bapak Khairul Azam, Spd selaku kepala bagian kurikulum, Bang Abu Bakar Siddik selaku pegawai bagian Kurikulum, Bang Wawan Syafi'i, Ibu Linda, Kak Dewi, Kak Liza Destria, Kak Helen, dan Devi Darmawati selaku pegawai bagian sekretariat, yang telah bersedia bekerja sama dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan.

10. Buat *Someone* yang istimewa yang selalu ada di hari-hari-Qu, memberi kebahagiaan dalam hidup-Qu, memberikan aQ dukungan disaat aQ lagi malas, yang selalu memotivasi aQ dalam menyelesaikan skripsi ini, dan hanya Gelar Sarjana inilah yang bisa membayar semua pengorbananmu.
11. Spesial buat Adinda Sri Rahmaini, yang selalu membantu penulis dan memberikan dukungan, sehingga dalam penulisan skripsi ini terasa mudah.
12. Kepada teman-teman seperjuangan-Qu Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara, 2008 Lokal ANA B yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu (Sitti Masyitah, Friska Amelia, Sri Yunita, Lidia Sandi, Rahayu Andika Putri, Lia Rahmah, Nurus Shadri, Sufa Nabila, M. Sukron Mufid, Beni Utoro, Yayan Tri Wahyudi, Ridho Anggi Maryanto, Zukrianto) kalian adalah cahaya hidup-Qu, kebersamaan yang kita lalui selama ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam hidup-Qu.....hikz_ hikz_hikz.....
13. Dan kepada teman-teman kost-Qu (Sri, Uun, Anthie, Ochie, Afny, Ryan n Lily) makasih supportnya dan teman-teman di manapun kamu berada terima kasih atas support dan Do'anya.

Penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengalaman, kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Namun demikian besar harapan penulis, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, Januari 2012

Penulis

YESI SUKESI
10875003110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :	Jumlah Prosentase Kelulusan dan Ketidaklulusan Siswa SLTP Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	3
Tabel 1.2 :	Jumlah Prosentase Kelulusan dan Ketidaklulusan Siswa SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir	5
Tabel 5.1 :	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Umur Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir	84
Tabel 5.2 :	Distribusi Frekuensi Responden Menurut Masa Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.....	85
Tabel 5.3 :	Distribusi Frekuensi Menurut Janis Kelamin Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.....	86
Tabel 5.4 :	Distribusi Frekuensi Menurut Status Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.....	87
Tabel 5.5 :	Distribusi Frekuensi Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir Responden Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir....	88
Tabel 5.6 :	Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan aktif mengawasi, memberi pengarahan atau bimbingan kepada guru dalam melakukan proses belajar mengajar siswa didalam kelas	91
Tabel 5.7 :	Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengarahkan guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.....	92

Tabel 5.8 :	Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru	93
Tabel 5.9 :	Tanggapan responden mengenai apakah pengawas melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah apakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.....	94
Tabel 5.10 :	Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan menerapkan standar pelaksanaan dengan baik dalam melakukan pengawasan.....	95
Tabel 5.11 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penerapan Standar Pelaksanaan	97
Tabel 5.12 :	Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan pernah memberikan evaluasi atas ketidakefektifan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru.....	100
Tabel 5.13 :	Tanggapan responden mengenai berhasil atau tidaknya guru mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan.....	101
Tabel 5.14 :	Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru bagaimana menyapaikan materi pelajaran dengan baik	102
Tabel 5.15 :	Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan melakukan pengawasan selalu disesuaikan dengan standar pengawasan yaitu minimal dua kali dalam satu bulan	

setiap satu sekolah	103
Tabel 5.16 : Tanggapan responden mengenai apakah dalam melakukan pengukuran kegiatan pengawasan standar dinas selalu disesuaikan dengan standar pusat	104
Tabel 5.17 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	106
Tabel 5.18 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan selalu melakukan kegiatan pengawasan dengan standar yang ditetapkan	108
Tabel 5.19 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan sudah menganut skala pengukuran yang ditetapkan sebagai patokan dalam pengawasan	109
Tabel 5.20 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan selalu menerapkan skala pengukuran dalam melakukan pengawasan	110
Tabel 5.21 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan selalu melakukan pengawasan langsung dan sekaligus membuat laporan hasil pengawasan	111
Tabel 5.22 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan sudah optimal	112
Tabel 5.23 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Membandingkan Hasil Pengukuran Dengan Standar	114

Tabel 5.24 :	Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengadakan evaluasi terhadap guru-guru di sekolah.....	116
Tabel 5.25 :	Tanggapan responden mengenai apakah guru selalu menerima sanksi dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas.....	117
Tabel 5.26 :	Tanggapan responden mengenai apakah guru selalu menerima sanksi dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas.....	118
Tabel 5.27 :	Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan memberikan koreksi langsung kepada guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar	119
Tabel 5.28 :	Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan dalam pengambilan korektif itu secara objektif	120
Tabel 5.29 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pengambilan Korektif.....	122
Tabel 5.30 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya rencana dan pelaksanaan serta pengawasan merupakan satu kesatuan tindakan, walaupun hal ini jarang terjadi, terutama pengawasan, padahal pengawasan ini sangat penting untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai. Menurut Murdick (2000:101) pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan, bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi.

Selanjutnya Soewarno Hadyningrat (1989:143) studi ilmu administrasi dan manajemen mengutip pendapat M.C Farland tentang pengertian pengawasan sebagai berikut : pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Di dalam era otonomi daerah, negara melimpahkan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing dengan memberikan kewenangan yang berskala provinsi yang meliputi semua kewenangan kecuali kewenangan pemerintah pusat yang berskala nasional. Serta urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota hampir sama dengan kewenangan yang dimiliki provinsi tetapi hanya sebatas meliputi lingkup kabupaten/kota saja.

Dalam kewenangan yang diberikan kabupaten/kota diatas terdapat kewenangan penyelenggaraan pendidikan, dalam 60 tahun terakhir kualitas

pendidikan di Indonesia sangat menyedihkan, menurut data hasil survey UNDP **(United Nations for Development Programme) (2002)**, kualitas sumber daya Indonesia ternyata hanya menduduki peringkat ke 110 dari 179 negara di dunia, hanya satu tingkat di atas Vietnam, padahal Vietnam selama puluhan tahun mengalami perang saudara, bahkan Indonesia jauh di bawah Philipina, Thailand, maupun Malaysia dan Singapura **(Tempo Interaktif, Edisi 29 Juli 2004)**.

Mutu pendidikan kian menurun, menurut penelitian Human Development Indeks (HDI) mengungkapkan tahun 2004 pendidikan Indonesia berada diurutan ke 111 dari 175 negara, penyebabnya terjadi diseluruh aspek mulai dari sarana yang tidak memadai, meningkatnya anak putus sekolah, obral ijazah, jual beli nilai, ketidakprofesionalan pendidik, kebijakan pemerintah yang anomaly dan kurikulum yang selalu berubah, juga dilihat dari output peserta didik dengan kualitas serba tanggung juga keahlian yang minim **(Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, 2004 dalam Taharudin, 2005:18)**.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau, yang juga merupakan daerah otonom, yang memiliki kewenangan yang berskala seperti di atas. Di Kabupaten Rokan Hilir menduduki prestasi pendidikan yang cukup baik, dalam sektor kelulusan siswa terutama siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. hal ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan yang selalu meningkat dari tahun ketahun. Dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi riau, dilihat dari kewenangan yang diberikan pemerintah pusat, kabupaten Rokan Hilir juga memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbicara tentang pendidikan tidak terlepas dari komponen siswa, guru, sarana, prasarana dan media pembelajaran yang akan membicarakan tentang kualitas dan kuantitas pendidikan. Kualitas hasil pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir sudah cukup memuaskan, hal ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan hasil ujian nasional siswa dari tahun ke tahun tingkat kelulusan siswa semakin meningkat, khususnya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Namun dari segi kuantitas juga masih perlu ditingkatkan dan diupayakan kedepan lebih baik lagi.

Dapat dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini jumlah prosentase tingkat kelulusan dan ketidaklulusan siswa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dari tahun ajaran 2005/2006-2010/2011 sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Jumlah Prosentase Kelulusan dan Ketidaklulusan Siswa SLTP Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No	Tahun	Jumlah Siswa	Lulus	Tidak Lulus	Prosentase Kelulusan	Prosentase Ketidaklulusan
1	2005/2006	5.097	4.850	247	95.15%	4.85%
2	2006/2007	5.097	4.965	132	97.41%	2.59%
3	2007/2008	8.226	7.948	278	96.62%	3.38%
4	2008/2009	9.070	8.408	662	92.70%	7.3%
5	2009/2010	9.573	9.361	212	97.79%	2.21%
6	2010/2011	6.999	6.982	17	99.76%	0.24%

Sumber : Data siswa SLTP di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah prosentase kelulusan siswa dan ketidaklulusan siswa di Kecamatan Bagko Kabupaten Rokan Hilir pada tahun ajaran 2005/2006 dengan jumlah siswa 5.097 siswa yang lulus berjumlah 4.850 orang atau 95.15%, sedangkan yang tidak lulus berjumlah 247 orang atau 4.85%. Pada tahun ajaran 2006/2007 dengan jumlah siswa 5.097 siswa yang lulus berjumlah 4.965 orang atau 97.41%, sedangkan yang tidak lulus berjumlah 132 orang atau 2.59%. Pada tahun ajaran 2007/2008 dengan jumlah siswa 8.226 siswa

yang lulus berjumlah 7.948 orang atau 96.62% sedangkan yang tidak lulus berjumlah 278 orang atau 3.38%. Pada tahun ajaran 2008/2009 dengan jumlah siswa 9.070 siswa yang lulus berjumlah 8.408 orang atau 92.70% sedangkan yang tidak lulus berjumlah 278 orang atau 7.3%. Pada tahun ajaran 2009/2010 dengan jumlah siswa 9.573 orang yang lulus berjumlah 9.361 orang atau 97.79%, sedangkan yang tidak lulus berjumlah 212 orang atau 2.21%. dan pada tahun ajaran 2010/2011 dengan jumlah siswa 6.999 orang yang lulus berjumlah 6.982 orang atau 99.76%, sedangkan yang tidak lulus berjumlah 17 orang atau 0.24%.

Dari data diatas, dapat dikatakan bahwa jumlah kelulusan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dari tahun ajaran 2005/2006-2010/2011 dapat dikatakan cukup baik, karena hasil kelulusan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam Proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan adanya pengawasan tersebut tingkat kelulusan siswa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir semakin meningkat. Adapun tujuan Dinas Pendidikan melakukan pengawasan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ini yaitu berupaya untuk pencapaian tujuan pendidikan melalui peningkatan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan **Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 39** yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Jangan kita hanya

selalu berkata mari kita tingkatkan SDM akan tetapi tidak memikirkan bagaimana caranya agar SDM tersebut dapat ditingkatkan.

Selain itu, dibawah ini akan disajikan data mengenai tingkat kelulusan dan ketidaklulusan siswa SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir, yaitu dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 : Jumlah Prosentase Kelulusan dan Ketidaklulusan Siswa SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No	Tahun	Jumlah Siswa	Lulus	Tidak Lulus	Prosentase Kelulusan	Prosentase Ketidaklulusan
1	2005/2006	313	287	26	91.69 %	8.31 %
2	2006/2007	230	-	-	100 %	0 %
3	2007/2008	145	-	-	100 %	0 %
4	2008/2009	173	-	-	100 %	0 %
5	2009/2010	287	286	1	99.65 %	0.35 %
6	2010/2011	293	-	-	100 %	0 %

Sumber : Data siswa SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah prosentase kelulusan siswa SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada tahun ajaran 2005/2006 dengan jumlah siswa 313 orang, yang lulus berjumlah 287 orang atau 91.69 %, dan yang tidak lulus berjumlah 26 orang atau 8.31 %, kemudian pada tahun ajaran 2009/2010 dengan jumlah siswa 287 orang yang lulus berjumlah 286 orang atau 99.65 %, dan hanya 1 orang siswa yang tidak lulus, hal ini dikarenakan siswa tersebut tidak hadir saat ujian nasional diadakan. Selanjutnya pada tahun ajaran 2006/2007-2008/2009 dan tahun ajaran 2010/2011 siswa yang lulus mencapai 100 %, artinya tidak ada satu siswapun yang tidak lulus.

Dari data diatas, dapat dikatakan bahwa jumlah kelulusan siswa SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir dari tahun ketahun dapat dikatakan sudah sangat baik, karena tingkat kelulusannya sudah mencapai 100 %. Hal ini disebabkan

karena pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan terhadap sekolah SMPN 1 Bangko sudah berjalan dengan baik.

Dalam hal ini, tugas pokok pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yaitu melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pengawas tersebut, ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yaitu :

1. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah,
2. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya,
3. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.

Mengacu pada SK Menpan Nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, Keputusan bersama Mendikbud nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas serta Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, dapat dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah yang meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA.

2. Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Berdasarkan tugas pokok diatas, maka tugas pengawas yaitu :

1. Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya.
2. Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
3. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa.
4. Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah.
5. Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/ bimbingan siswa.
6. Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di sekolah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian ijazah.
7. Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan stakeholder lainnya.

8. Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program pengawasan semester berikutnya.
9. Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas maka tugas pengawas mencakup :

- a. Inspecting (mensupervisi)
- b. Advising (memberi advis atau nasehat)
- c. Monitoring (memantau)
- d. Reporting (membuat laporan)
- e. Coordinating (mengkoordinir)
- f. Performing leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut (**Ofsted, 2003**)

Berdasarkan permendiknas No.12 Tahun 2007 tentang Standar Dinas Pendidikan/skala pengukuran kompetensi pengawas sekolah mengacu pada :

1. Kompetensi kepribadian
2. Kompetensi supervisi manajerial
3. Kompetensi supervisi akademik
4. Kompetensi supervisi evaluasi pendidikan
5. Kompetensi supervisi penelitian dan pengembangan
6. Kompetensi supervisi sosial.

Sedangkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdapat dalam PP No. 19 Tahun 2005, instrumen akreditasi sekolah mengacu pada 8 (delapan) komponen Standar Nasional Pendidikan, yaitu sebagai berikut :

1. Standar isi
2. Standar proses
3. Standar kompetensi langsung
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana\
6. Standar pengelolaan
7. Standar pemberdayaan
8. Standar penilaian dan pendidikan.

Perlu diketahui bahwa, sebenarnya tugas pengawas itu selalu tersendat-sendat diakibatkan karena tidak adanya dana operasional yang akan digunakan dalam melakukan pengawasan. Sehingga terkadang pengawas Dinas Pendidikan tidak melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu 2/4 artinya 2 hari mereka di kantor, dan 4 hari mereka turun kelapangan untuk melakukan pengawasan.

Kepala Dinas Pendidikan **H. Azhar. A, SE. Msi** menyatakan bahwa pendidikan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Rokan Hilir, dan masyarakat. Kemajuan pendidikan kedepan merupakan tanggung jawab bersama. Bupati Kabupaten Rokan Hilir juga menegaskan bahwa pendidikan harus didahulukan di

daerah Kabupaten Rokan Hilir, karena dengan mutu pendidikan inilah yang menunjukkan bagusnya suatu daerah atau negara.

Selain itu Bupati Rokan Hilir juga menegaskan bahwasannya pendidikan harus diutamakan untuk dibenahi agar mutu pendidikan daerah Rokan Hilir semakin meningkat. Ini semua adalah tugas pemerintah dan guru yang diberi wewenang kepada Dinas Pendidikan. Pemerintah membangun sarana dan prasarana, sedangkan guru sebagai pendidik ikut memotivasi murid sehingga mutu pendidikan daerah semakin meningkat.

Adapun cara meningkatkan mutu pendidikan tersebut adalah dengan meningkatkan kualifikasi akademika terutama terhadap guru. Selain itu upaya yang ditempuh oleh kepala Dinas Pendidikan kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan memperbaiki kinerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya menurut **Koho (1998:61)** faktor pendidikan merupakan esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (PEMDA). Pentingnya faktor ini karena dengan pendidikan akan membentuk manusia yang berkualitas yang merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusia yang merupakan pelaku dan penggerak agar proses mekanisme pemerintahan tersebut berjalan baik, maka manusia harus mempunyai pendidikan yang baik pula.

Dalam hal ini, menurut kepala Dinas Pendidikan bahwasannya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sangat serius dan tidak main-main dalam menangani dan membenahi dunia pendidikan terutama menyangkut kualitas tenaga pendidik. Oleh karena itu kepala Dinas Pendidikan mengingatkan kepada semua guru yang

ada di Kabupaten Rokan Hilir agar menjadi guru yang baik dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Disisi lain Azhar mengatakan sejalan dengan Program Nasional **(Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007)** dalam upaya meningkatkan kompetensi guru yang telah melaksanakan dan mengikutsertakan pengawas dan guru, baik PNS maupun Honorer yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru.

Sertifikasi merupakan instrument untuk memetakan kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogic (kecerdasan), kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Diharapkan guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik adalah guru yang sesuai dengan Standart Nasional Pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir mengintensifkan pengawasan suvervisor dan konseling (profesi) terhadap guru di daerah terebut. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan minimal dua kali dalam sebulan setiap satu sekolah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. supervisor dan bimbingan konseling tugasnya memberikan pengawasan terhadap guru bukan inspeksi mencari kesalahan guru, pengawasan yang diberikan meliputi pengawasan proses belajar mengajar dan etika guru.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Analisis Pengawasan Dinas Pendidikan dalam Proses Belajar-Mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko**

Kabupaten Rokan Hilir (Studi kasus pada SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir).

1.2. Perumusan Masalah

Dalam kehidupan sosial dan politik dimana otonomi daerah sekarang ini pendidikan merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan pendidikan akan terbentuk manusia-manusia yang memiliki sumberdaya yang berkualitas yang akan membangun daerahnya. Hal ini tentu harus didukung dengan adanya proses belajar mengajar yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah **“Analisis Pengawasan Dinas Pendidikan dalam Proses Belajar Mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (Studi kasus pada SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir).**

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar-mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Bagaimana hubungan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan terhadap prosentase kelulusan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui hubungan pengawasan yang dilakukan Dinas pendidikan terhadap prosentase kelulusan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis akan menghasilkan suatu pengetahuan tentang pentingnya pengawasan Dinas Pendidikan terhadap proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

b. Secara praktis

1. Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai bahan input kepada pihak Dinas Pendidikan dalam rangka peningkatan pengawasan khususnya terhadap Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
2. Sebagai dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Untuk menambah wawasan bagi penulis terutama yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori- teori yang relevan dengan judul penelitian sebagai landasan dalam pembahasan skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam pembahasan yang keempat ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat akan dilakukannya penelitian.

BAB V ANALISIS DATA

Dalam pembahasan di bab ini akan membahas tentang hasil dari penelitian yaitu tentang analisis pengawasan dinas pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

BAB VI PENUTUP

Dalam pembahasan di bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek peneliti agar bisa lebih baik lagi dimasa yang akan datang

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritik

Konsep teori merupakan teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (*hipotesis*)(Sugiono, 1998:200). Sedangkan teori adalah serangkaian asumsi konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian, penulis akan menjelaskan kerangka teori di bawah ini.

Dalam konsep teoritis ini diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu : **“Analisis pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”**.

2.2. Pengertian Pengawasan

Dalam setiap organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu proses yang menggerakkan kearah sasaran yang hendak dicapai. Proses penggerakkan ini lazim disebut dengan proses manajemen, dimana suatu proses kegiatan pimpinan yang harus dilakukan dengan mempengaruhi cara-cara pemikiran untuk mencapai

tujuan yang sudah ditetapkan melalui bekerja sama dengan orang-orang sebagai tenaga kerja. Serta memanfaatkan sumber-sumber lainnya dan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat.

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai dengan ketentuan, waktu, dan perencanaan **(Kartono, 2002:81)**. Pengawasan merupakan salah satu fungsi administrasi yang berperan untuk mengendalikan proses administrasi agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektifitas. Melalui pengawasan maka pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Winardi (1993:15) menegaskan bahwa “tindakan pengawasan itu harus mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja, dan jika perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif **(G.R. Terry dan L.W Rue, 1996:10)**.

Menurut M.C Farland (dalam buku Soewarno Handyaningrat, 1989:143) pengertian pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh

bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Menurut Robins (2004:158-159) pengawasan adalah proses memonitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu-individu dan organisasi itu sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuannya, dan memberikan koreksi bila tidak tercapai.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar dan perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengetahui apakah yang telah terjadi suatu penyimpangan tersebut. serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bahwa semua sumberdaya perusahaan telah digunakan seefektif mungkin guna mencapai perusahaan (**Yusuf dan Kadarman, 1997: 159**)

Lebih lanjut menurut **Komaruddin (1994:104)** "Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti".

Menurut **Siagian** dalam buku **Syafaruddin** yang berjudul "manajemen lembaga pendidikan islam" berpendapat bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut S.P Siagian (2001:47) pengawasan adalah merupakan langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Kartini Kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan sudah terlaksana atau belum, hal ini berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan program yang direncanakan.

Pengawasan merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan berfungsi untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan.

Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam mengukur variabel ini adalah sebagai berikut :

1. **Standar pelaksanaan.** Standar-standar pelaksanaan dalam rangka ini dimaksudkan sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan bagi pegawai dalam memulai pekerjaan yang diawasi.
 2. **Penentuan pengukuran pelaksanaan.** Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniu atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
 3. **Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar-standar dan menganalisa penyimpangan.** Artinya membandingkan antara konsep dan implementasi tentang kegiatan pengawasan.
 4. **Pengambilan korektif.** Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan.
- (Kartini Kartono 2002:153)**

Menurut Herujito (2002:242) pengawasan adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Prinsip-prinsip pengawasan menurut Herujito ada tujuh yakni :

1. Mencerminka sifat dari apa yang diawasi
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi
3. Luwes
4. Mencerminkan pola organisasi

5. Ekonomis
6. Mudah dipahami
7. Dapat segera diadakan perbaikan

Menurut Herujito (2004:96) langkah-langkah pengawasan adalah:

- a. Menetapkan standar pelaksanaan dan metode yaitu berupa standar waktu, fisik/kualitas dan standar keuangan.
- b. Mengukur prestasi kerja yaitu dapat dilakukan melalui observasi, pengujian atau laporan tertulis.
- c. Membandingkan standar dengan hasil pelaksanaan kegiatan yaitu menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.
- d. Mengambil tindakan koreksi atau melakukan evaluasi.

Karena itu pengawaan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawaan bergantung pada macamnya informasi yang diterima (**Nanang Fattah,2004:102**).

Pengawasan dilihat oleh Sudirman sifat dan waktunya yakni:

1. Pengawasan prevektif (pencegahan) adalah pengawasan yang dilakukan sebelumnya, agar suatu kegiatan atau pekerjaan tidak terjadi penyimpangan.
2. Pengawasan represif (pemeriksaan) adalah pengawasan yang dilaksanakan setelah suatu pekerjaan dilakukan, tujuannya apabila ditemukan kesalahan tau penyimpangan maka diharapkan setelah pemeriksaan itu, kesalahan atau penyimpangan serupa tidak akan terjadi lagi.
3. Pengawasan disaat terjadi proses pengawasan. Pelaksanaan pengawasan ini lebih cenderung disebut sebagai pemeriksaan atau pengendalian seketika.

4. Pengawasan berkala yaitu pengawasan yang dilakukan secara periodik, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali.
5. Melakukan pengawasan atau pemeriksaan secara mendadak. Hal ini agar mereka selalu siap kepada pekerjaannya dan ditujukan sebagai pengawasan prevektif, sehingga penyimpangan dapat diketahui lebih dini dan dapat diperbaiki segera mungki **(Sudirman, 1994:93-94)**

Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan tugas, sebab tujuan suatu organisasi tidak akan tercapai secara optimal apabila tidak dilakukan pengawasan kinerja para pegawai.

Selanjutnya berkaitan dengan arti penting pelaksanaan pengawasan dalam organisasi agar kegiatan dapat terlaksana, maka perlu diperhatikan syarat-syarat pengawasan itu sendiri, yaitu :

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang
2. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal yang penting
3. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu dan pribadinya
4. Pengawasan harus objektif
5. Pengawasan harus luwes (fleksibel)
6. Pengawasan harus membawa kepada tindakan perbaikan

Adapun menurut **T. Hani Handoko (1986:362-364)** tahap-tahap proses pelaksanaan pengawasan yang baik itu seperti :

1. Menentukan ukuran perencanaan
2. Menilai, yaitu dilakukan secara langsung dan tidak langsung
3. Mengadakan koreksi dari pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang sedang berjalan.

Nanang fattah (2004:106-107) mengatakan ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan agar pengawasan ini dapat berfungsi efektif antara lain:

1. Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan
2. Standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan, ada dua tujuan pokok yaitu: untuk memotivasi dan untuk dijadikan patokan guna membandingkan dengan prestasi, artinya jika pengawasan ini efektif dan dapat memotivasi seluruh anggota untuk mencapai prestasi tinggi.
3. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.
4. Banyaknya pengawassan harus dibatasi, artinya jika pengawasan terhadap bawahan terlampau sering, ada kecenderungan mereka kehilangan otonomnya dan dapat dipersepsi pengawasan penyelewengan.
5. Sistem pengawasa harus dikemudi tanpa megorbankan otonomi da kehormatan pimpinan tetapi fleksibel, artinya sistem pengawasan menunjukkan kapan, dan dimana tindakan koreksi harus diambil.

2.3. Tujuan Pengawasan

Pengawasan atau *controlling* bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pemimpin mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Mencari dan memberitahukan kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Adapun tujuan pengawasan menurut Sukarna adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jalannya kerjasama lancar atau tidak.
2. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengushakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang serupa atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasarannya atau sesuai dengan yang telah ditentukan.
4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam planning atau tidak.
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan yang telah ditetapkan dalam rencana (standar) dan sebagai tambahan.

6. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur atau kebijaksanaan yang telah ditentukan (**Sukarna, 1993:11**).

2.4. Prinsip Pengawasan.

Supaya proses pengawasan dapat menjadi efektif harus dipenuhi beberapa prinsip yaitu :

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi pada kebenaran menurut peraturan yang berlaku, berorientasi pada prosedur yang ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin daya dan guna hasil pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus.
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijakan waktu yang akan datang (**Soewarno, 1985:149-150**).

2.5. Fungsi Pengawasan

Adapun fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang di dalamnya terkandung kegiatan perbaikan dan penyempurnaan sehingga pekerjaan/kegiatan sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.

Penting diketahui bahwa pengawasan sangat erat hubungannya dengan fungsi perencanaan yaitu dengan adanya pengawasan maka kegiatan yang telah mendapat perbaikan dan penyempurnaan ini akan menjadi feed back bagi perencanaan berikutnya.

2.6. Proses Pengawasan

Adapun proses pengawasan adalah :

a. Menetapkan Standar

Sebelum proses pengawasan ditentukan dilakukan standar dinyatakan secara numeric (angka) untuk mengurangi subjektifitas. Berikut ini dikemukakan jenis-jenis standar yang sering digunakan :

1. Standar waktu, yang menyatakan lamanya waktu untuk membuat atau menciptakan suatu barang, keadaan atau jasa tertentu.
2. Standar produktifitas, yang didasarkan data output barang-barang atau jasa tertentu.
3. Standar biaya, yang didasarkan atas kumpulan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa.
4. Standar kualitas, didasarkan atas tingkat kualitas output yang dihasilkan
5. Standar perilaku, yang didasarkan atas jenis-jenis tingkah laku yang diinginkan dari para pekerja dalam organisasi. Walaupun hal ini tidak mudah merumuskannya.

b. Menentukan Unjuk Kerja

Pengawasan dari suatu unjuk kerja terdiri dari pemeriksaan atas penyimpangan dari standar dan menentukan batas toleransi penyimpangan yang diperbolehkan. Evaluasi ini memerlukan pengamatan dan pengukuran dan hal ini memengaruhi kemungkinan membuat standar baru untuk masa yang akan datang.

c. Melakukan Koreksi

Sering kali koreksi dilakukan maka terlebih dahulu perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Sebab penyimpangan itu bisa terjadi oleh mesin atau oleh operator ataupun peralatan yang ada.

2.7. Jenis-Jenis Pengawasan

1. . Menurut Waktu Pelaksanaannya, dibagi atas :

- a. Setelah kegiatan : Pengawasan ini disebut juga dengan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui hasil dari kerja setiap anggota kelompok dan untuk mengetahui kesalahan yang terjadi agar kesalahan-kesalahan ini tidak terulang dimasa yang akan datang.
- b. Pada saat kegiatan : pengawasan ini lebih bersifat kontrol. Pengawasan ini lebih bertujuan untuk memberikan pengarahan-pengarahan untuk memperbaiki kinerja para anggota.

2. Menurut Cara Pelaksanaannya, dibagi atas :

- a. Secara langsung
 1. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi

2. Dengan latar belakang tertentu, seperti ada dugaan penyimpangan atau karena ada kejadian penting seperti pergantian kepengurusan.
- b. Secara tidak langsung
 1. Melakukan review, yaitu mengawasi apa saja yang telah terjadi pada suatu organisasi.
 2. Rutin, yaitu pelaksanaan pengawasan itu sendiri sudah diagendakan sebelumnya.
3. Menurut Subjek Pelaksanaannya, dibagi atas :
 - a. Pengawasan Melekat, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki kekuatan power yang dilakukan secara terus-menerus agar tugas-tugas bawahan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat yang tugas pokoknya khusus membantu pimpinan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing
 - c. Pengawasan Teknis Fungsional, setiap instansi berkewajiban untuk melakukan pengawasan agar kebijakan-kebijakan negara sesuai dengan bidang tugas pokoknya masing-masing, ditaati oleh masyarakat maupun aparatur.
 - d. Pengawasan teknis fungsional merupakan konsekuensi dari pelaksanaan dasar fungsionalisasi dan merupakan fungsi lini atau operasional dari

instansi tersebut. Pengawasan teknis fungsional berarti pengawasan yang ditujukan kepada aparatur dan juga masyarakat.

- e. Pengawasan masyarakat, merupakan pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada negara sebagai bentuk sosial kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat negara yang demokratis.
- f. Pengawasan legislatif dikenal juga dengan pengawasan politik, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh DPR/DPRD sebagai lembaga legislatif yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah. Pengawasan legislatif ini ditujukan kepada pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, hukum dan peraturan pelaksanaannya yang termanifestasikan pada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- g. Pengawasan yudikatif, merupakan salah satu fungsi Mahkamah Agung untuk mengawasi peraturan dibawah Undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang secara formal untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945.

2.8. Teknik-Teknik Pengawasan

Adapun teknik-teknik pengawasan antara lain yaitu :

- a. Hal-hal yang menonjol yang mewakili lain-lainnya
- b. Biaya, artinya segala kegiatan pengawasannya dilakukan dengan pengendalian biaya
- c. Waktu, dengan menjaga waktu yang digunakan

- d. Hasil atau produk, atau jasa yang dihasilkan
- e. Proses atau prosedur, apakah sudah benar termasuk urutan pekerjaan

2.9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Menurut **T. Hani Handoko (1998:366)** faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu :

- a. Perubahan lingkungan organisasi, melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh terhadap barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau mampu memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh perubahan-perubahan tersebut.
- b. Peningkatan kompleksitas organisasi, semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati, sehingga pelaksanaan pengawasan bisa berjalan secara efektif dan efisien
- c. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
- d. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan

apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.

Menurut **E. Mulyasa (2004:107)** terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produktifitas kerja, yaitu :

- a. Sikap mental, berupa motivasi, disiplin dan etika kerja
- b. Pendidikan, pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan akan lebih mampu menjalankan tugasnya dengan baik
- c. Keterampilan, makin terampil tenaga kependidikan akan lebih mampu menjalankan tugasnya dengan baik
- d. Manajemen diartikan dengan hal yang berkaitan dengan sistem yang diterapkan oleh pimpinan untuk mengelola, mengawasi, dan memimpin, serta mengendalikan tenaga kependidikan
- e. Hubungan industrial
- f. Tingkat penghasilan yang memadai dapat menimbulkan konsentrasi kerja
- g. Gizi dan kesehatan akan meningkatkan semangat kerja dan mewujudkan produktivitas kerja yang tinggi
- h. Lingkungan dan suasana kerja yang baik akan mendorong tenaga kependidikan senang bekerja dan meningkatkan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik menuju kearah penungkatan produktivitas
- i. Kesempatan berprestasi dapat menimbulkan dorongan psikologis untuk meningkatkan dedikasi serta pemanfaatan potensi yang dimiliki.

2.10. Pandangan Islam Tentang Pengawasan

Islam adalah agama yang universal (**Syamsil**), integral (**Kamil**), dan menyempurnakan (**Mutakamil**) bagi semua sistem yang ada. Dengan kata lain sesungguhnya Allah SWT jauh-jauh sebelumnya telah memberikan konsep yang paling sempurna untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Konsep tersebut dinamakan muraqabah.

Muraqabah adalah pengawasan yang sebenarnya. Karena ia merupakan sistem pengawasan diri bagi individu bukan hanya sebatas dalam kaitanya dengan aspek materi dan keduniaan belaka, namun jauh menembus batas dan kemampuan dengan nilai-nilai keabadian dan kekuatan yang berada diluar kemanusiaan dan kealaman itu sendiri.

Adapun pandangan islam terhadap pemberian amanat dan pengawasan dapat dilihat dalam al Quran surat

1. QS. An Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tafsir QS. An-Nisa ayat 58 diatas yaitu Allah SWT menerangkan bahwa amanat dan tanggung jawab adalah perintah Allah kepada seluruh hambanya, termasuk yang diperintahkan juga adalah antara semua manusia dan Allah adalah sebaik-baik pemberi pengajaran akan keadilan itu. Maka hendaklah orang beriman menjadikan keadilan Allah sebagai standar, bukan yang lainnya. Di dalam melaksanakan hukum, sementara Allah tetap mengawasi dan memperhatikan bagaimana kita melaksanakan perintahnya. Firman Allah : sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

Yang dimaksud dengan amanat ialah tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada manusia sebagai khalifah. Termasuk menetapkan hukum diantara manusia-manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, dengan berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunah rasul.

2. QS. Al Fajr, 89:14

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

Tafsir QS. Al-Fajr, 89:14 diatas yaitu Ibnu Abbas mengatakan, mendengar, dan melihat yakni senantiasa mengawasi hamba-hambanya apa yang mereka kerjakan da memberikan balasan kepada masing-masing sesuai usahanya didunia dan diakhirat. Dan semua makhluk akan diperlihatkan dihadapannya

(Allah) lalu diberikan keputusan berdasarkan keadilannya, dan masing-masing akan menerima apa yang selayaknya mereka terima. Dan Dia maha suci dari kedzoliman dan kesewenangan.

3. QS. Al-Mukmin ayat 19

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾

Artinya : Dia mengetahui (pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.

Tafsir QS. Al-Mukmin ayat 19 diatas yaitu Allah SWT menerangkan bahwa ia mengetahui penglihatan mata yang khianat dan pandangan yang curang. Ibnu Abbas berkata memberikan contoh penglihatan mata seseorang yang khianat : seorang laki-laki berada ditengah-tengah kaumnya, maka lewatlah didekat mereka seorang perempuan, ia memperlihatkan kepada kaumnya bahwa ia memejamkan matanya dan tidak melihat wanita yang lewat itu. Jika kaumnya tidak memperhatikannya, ia membuka matanya untuk melihat wanita itu. Jika kaumnya melihat dia, dia menunduk lagi menyembunyikan pandangannya. Penglihatan khianat yang curang seperti itu Allah SWT mengetahui bahwa didalam hati laki-laki itu tersembunyi niat ingin melihat aurat wanita yang lewat itu. Begitu juga Allah mengetahui apa-apa yang disembunyikan didalam hati.

Dari beberapa uraian ayat diatas yang menjelaskan tentang pengawasan, dapat dikatakan bahwa pengawasan Allah SWT sangat berbeda dengan pengawasan yang dijalankan oleh umatnya. sebab secara umum dalam buku filsafat administrasi negara menerangkan bahwa pengawasan itu terbagi dua, yaitu

pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Kedua pengawasan tersebut memiliki tata prosedur yang berbeda. Namun yang lebih esensial adalah kedua pengawasan tersebut yang dilakukan oleh manusia sangat terbatas oleh waktu. Jika dibandingkan dengan pengawasan Allah kepada hambanya/manusia tentu tidak dibatasi oleh waktu. Artinya bahwa setiap gerak gerik, perbuatan, pola pikir, dan lain-lain pengawasan Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dalam hal ini manusia yang bertindak sebagai pejabat negara bahwa pengawasan harus dimaknai sebagai totalitas dan kolektitas perbuatannya diawasi oleh Allah, bukan takut kepada seseorang atau atasan. Sehingga hasil yang diharapkan adalah terwujudnya pegawai yang sadar hukum, tanggung jawab dan mampu mengemban tugas negara dengan baik. Sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang, karena dia mengetahui setiap perbuatannya diawasi Allah dan dia mengetahui semua perbuatan akan diminta pertanggungjawaban didepan Allah.

Jadi dalam hal ini, jika dihubungkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, sangat jauh berbeda dengan pengawasan Allah. Sebab mereka melakukan pengawasan pada saat mereka bertugas, artinya masih dibatasi oleh waktu, namun terkadang itu pun masih ada juga yang melakukan penyelewengan, dengan arti kata mereka kadang tidak melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara pengawasan Allah sangat kekal. Allah senantiasa mengawasi setiap gerak gerik, tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Kontrol atau pengawasan yang paling efektif adalah yang datang dari diri sendiri, al Quran telah memberikan petunjuk bahwasannya kita memang tidak

sedikitpun bisa lepas dari pengawasan Allah. Untuk itu Allah SWT telah menciptakan anggota tubuh kita untuk memberikan pertanggungjawaban pada akhirat nanti.

2.11. Pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Pendidikan Rokan Hilir memiliki beberapa pembagian kewenangan, salah satunya yaitu sebagai pengawas sekolah, baik tingkat dasar, menengah, maupun tingkat atas. Dalam hal ini, penulis hanya mengkhususkan tugas Dinas Pendidikan sebagai pengawas sekolah pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yaitu memonitoring guru dengan cara melihat bagaimana cara guru mengajar di kelas, dan bagaimana persiapan guru tersebut sebelum mengajar, serta memberikan pembinaan terhadap guru-guru di sekolah.

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan *evaluasi* adalah memposisikan data-data tersebut agar dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan dikhawatirkan

akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu *Monitoring* dan *Evaluasi* harus berjalan seiring.

Jadi, dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Pendidikan melakukan pengawasan yaitu :

- a. Karena pengawasan merupakan tugas pokok Dinas Pendidikan yang harus dilakukan secara rutin
- b. Untuk meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Rokan Hilir
- c. Untuk mencapai target kelulusan siswa dalam ujian nasional

Berdasarkan faktor-faktor pengawasan diatas, Dinas pendidikan mengupayakan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ada. Standar yang ditetapkan oleh pusat yaitu:

1. Rata-rata hasil Ujian Nasional untuk mata pelajaran yang diujikan nasionalkan adalah 5.00
2. Nilai mata pelajaran yang tidak diujikan nasionalkan tidak boleh kurang dari 4.00, jikalau ada hanya boleh dua mata pelajaran yang memiliki nilai di bawah 4.00.

Sedangkan standar pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yaitu berusaha untuk menjalankan standar yang telah ditetapkan oleh pusat. Di samping itu, Dinas Pendidikan melakukan pengawasan rutin setiap hari ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir khususnya ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko. Tujuannya untuk memonitoring guru dan siswa dalam kesiapannya menghadapi Ujian Nasional. Evaluasi dari kegiatan ini akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan guna untuk mengevaluasi

apakah standar yang telah ditetapkan oleh Dinas pendidikan sudah dijalankan secara maksimal atau belum.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai standar di atas agar bisa meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir antara lain:

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap guru-guru mata pelajaran yang diujikan nasionalkan
2. Mengadakan try out pada siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional
3. Melakukan penambahan jam – jam pelajaran pada mata pelajaran yang akan diujikan nasionalkan.
4. Memperbanyak pemberian tugas-tugas latihan kepada siswa agar mereka dapat mengetahui gambaran soal soal Ujian Nasional
5. Memberikan arahan kepada guru-guru mata pelajaran yang diujikan nasionalkan agar mereka lebih meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai guru.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, kepala sekolah juga berperan sebagai pengawas khususnya pada SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir terhadap kinerja guru. Hal itu dapat dilihat sebagaimana pengawasan yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru SMPN 1 Bangko.

Kepala Sekolah SMPN 1 Bangko menjelaskan terdapat tiga hal yang menjadi tolak ukur pengawasan kepala sekolah terhadap guru-guru yaitu :

- a. Nilai siswa harus memenuhi standar KKM
- b. Setiap guru harus membuat RPP sesuai dengan kurikulum yang diajarkan
- c. Kehadiran guru harus memenuhi 95 %.

Hal diatas harus dipenuhi oleh setiap guru dalam pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Apabila terdapat ketidaksesuaian guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah, maka kepala sekolah memberikan teguran pengarahan kepada guru yang bersangkutan untuk memperbaikinya dimasa yang akan datang. Apabila guru tersebut sudah diberi arahan namun tidak melakukan perubahan juga, maka guru tersebut dilaporkan kepada Dinas Pendidikan (**Zakaria, S.Pd : Tgl, 16 Januari 2012**).

2.12. Hipotesis

Hipotesa adalah jawaban sementara yang masih diuji kebenarannya. Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan hipotesis penelitian yakni sebagai berikut :

“Diduga Pengawasan Dinas Pendidikan dalam Proses Belajar Mengajar Berpengaruh Terhadap Tingkat Kelulusan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”

2.13. Definisi Konsep

Menurut MasriSingarumbun (dalam Rahman. D, 2006: 34) konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik, kejadian keadaan, kelompok, atau individu tertentu.

Definisi konsep bertujuan sebagai kerangka berfikir agar tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian.

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman dalam penulisan skripsi ini variabel yang digunakan adalah pelaksanaan pengawasan Dinas Pendidikan Dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Standar pelaksanaan.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan.
3. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar-standar dan menganalisa penyimpangan.
4. Pengambilan korektif. **(Kartini Kartono 2002:153)**

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan formal yaitu mencari, menemukan, mempelajari, dan memahami suatu ilmu yang berjalan dua arah antara guru dan siswa di suatu tempat.

Standar pelaksanaan merupakan satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan bagi pegawai dalam memulai pekerjaan yang diawasi.

Penentuan pengukuran pelaksanaan adalah suatu cara yang digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.

Membandingkan hasil pengukuran dengan standar yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer.

Pengambilan koreksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan sehingga perlu diadakannya perbaikan dalam pelaksanaan.

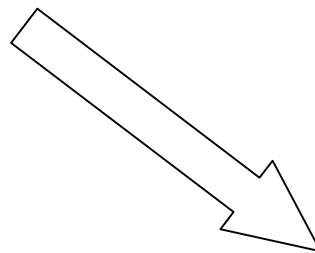
2.14. Kerangka Berfikir

Menurut Kartini Kartono
(2002:153)

1. Menentukan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan
3. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar-standar dan menganalisa penyimpangan
4. Pengambilan korektif

Menurut Herujito
(2004:96)

1. Menetapkan standar pelaksanaan dan metode
2. Mengukur prestasi kerja
3. Membandingkan standar dengan hasil pelaksanaan kegiatan
4. Mengambil tindakan koreksi atau mengambil tindakan evaluasi

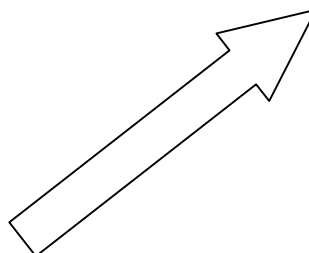


Variabel Pengawasan
Dinas Pendidikan

1. Penerapan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Membandingkan hasil pengukuran dengan standar
4. Pengambilan korektif



Pengawasan
Dinas
Pendidikan



2.15. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan-batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadinya salah pengertian dalam memahami tulisan ini. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa fokus penelitian ini adalah analisis pengawasan dinas pendidikan dalam poses belajar-mengajar siswa sekolah lanjutan tingkat pertama kecamatan bangko kabupaten rokan hilir.

Merujuk pada pendapat **Mochtar Mas'ood(1990:90)** konsep operasional adalah serangkaian prosedur yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan kala kita hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep.

Adapun yang menjadi konsep operasional variabel dari pelaksanaan pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah :

1. Penerapan standar pelaksanaan

Dengan pengukuran

Sangat Efektif : Apabila penerapan standar pelaksanaan pengawasan sangat diterapkan sebagai patokan bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar siswa

Efektif : Apabila penerapan standar pelaksanaan pengawasan diterapkan sebagai patokan bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar siswa

- Cukup Efektif : Apabila penerapan standar pelaksanaan pengawasan cukup diterapkan sebagai patokan bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar siswa
- Kurang Efektif : Apabila penerapan standar pelaksanaan pengawasan kurang diterapkan sebagai patokan bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar siswa
- Tidak Efektif : Apabila penerapan standar pelaksanaan pengawasan tidak diterapkan sebagai patokan bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar siswa.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dengan pengukuran

- Sangat Efektif : Apabila pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan lebih dari dua kali dalam satu bulan atau rutin setiap minggu setiap satu sekolah
- Efektif : Apabila pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan lebih dari dua kali dalam satu bulan, tetapi tidak rutin setiap minggu dilakukan dalam satu sekolah
- Cukup Efektif : Apabila pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan hanya dua kali dalam satu bulan setiap satu sekolah
- Kurang Efektif : Apabila pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan hanya satu kali dalam sebulan setiap satu sekolah

Tidak Efektif : Apabila Dinas Pendidikan tidak ada melakukan pengawasan disekolah-sekolah.

3. Membandingkan hasil pengukuran dengan standar

Dengan pengukuran

Sangat Efektif : Apabila pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sangat sesuai dengan aturan konsep pengawasan dan sangat mampu menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan

Efektif : Apabila pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan aturan konsep pengawasan dan mampu menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan

Cukup Efektif : Apabila pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan cukup sesuai dengan aturan konsep pengawasan dan cukup mampu menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan

Kurang Efektif : Apabila pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kurang sesuai dengan aturan konsep pengawasan dan kurang mampu menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan.

Tidak Efektif : Apabila pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan aturan konsep pengawasan dan tidak

mampu menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan.

4. Pengambilan Korektif

Dengan pengukuran

Sangat Efektif : Apabila Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan sangat mengetahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan dan melakukan evaluasi terhadap pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Efektif : Apabila Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan mengetahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan dan melakukan evaluasi terhadap pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya

Cukup Efektif : Apabila Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan cukup mengetahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan dan melakukan evaluasi terhadap pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya

Kurang Efektif : Apabila Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan kurang mengetahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan dan melakukan evaluasi terhadap pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya

Tidak Efektif : Apabila Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan tidak mengetahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan dan tidak melakukan evaluasi terhadap pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Dinas Pendidikan di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yaitu pada bulan Agustus- Desember 2011.

3.2. Jenis dan Sumber Data

- 1.2.1. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama atau aslinya (**Suryabrata,2003:39**). Atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan penulis secara langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lingkup dan berkaitan dengan masalah yang diteliti
- 1.2.2. Data sekunder, adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi-informasi, keterangan-keterangan, yang berasal dari dokumen, laporan, dan arsip dari pihak terkait. Adapun data-data sekunder tersebut ialah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar-mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Bagaimana hubungan pengawasan yang dilakukan Dinas pendidikan terhadap prosentase kelulusan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

3.3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan menggolongkan atau mengklasifikasikan dan menganalisa data sehingga dapat menggambarkan secara jelas tentang objek yang diteliti, yang pada akhirnya dilakukan pengambilan kesimpulan.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (**Sugiono, 2005:90**). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pengawas Dinas Pendidikan yang berkedudukan sebagai pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berjumlah 60 orang. Namun dalam hal ini, penulis hanya mengambil 33 orang dari jumlah populasi yang ada, sebab tidak semua dari 60 pengawas tersebut mengetahui secara detail tentang pengawasan, maka dari itu penulis hanya mengambil 33 orang dari pengawas yang paham tentang pengawasan sekolah khususnya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan guru mata pelajaran yang diujikan nasionalkan sebanyak 8 orang. Jadi seluruh populasinya berjumlah 41

orang. Populasi ini sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini. Karena menurut **Arikunto**, jika populasi berjumlah dibawah 100 orang maka semua harus dijadikan sebagai sampel dalam penelitian atau disebut dengan sampel jenuh/metode sensus.

Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu penulis menggunakan teori yang disampaikan oleh **Moelong (2000:165-166)**, yaitu purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Dengan melihat tidak semua dari populasi yang ada mengetahui, memahami dan ikut terlibat didalam melakukan proses pengawasan, dengan ini penulis mengambil sampel dan orang yang paham akan hal ini yaitu pengawas dari instansi Dinas Pendidikan, serta guru SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang mata pelajarannya diujikan nasionalkan.

3.5. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

- 1.5.1. Wawancara atau interview**, yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara menanyakan langsung kepada pihak terkait untuk

mendapatkan informasi-informasi yang valid baik menggunakan alat perekam maupun menggunakan alat pencatat.

1.5.2. Survei, yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan atau terjun kelapangan secara langsung kelokasi penelitian.

1.5.3. Kuesioner (angket), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

3.6. Teknik Analisis Data

Untuk mengkaji kebenaran penelitian secara empiris, karena penelitian ini berbentuk kualitatif, penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan yang sifatnya mendukung dan menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggambarkan secara utuh mengenai pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Geografis Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dengan ibu kota Bagansiapiapi yang merupakan kota terbesar, bersejarah dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Bagansiapiapi juga merupakan ibu kota Kecamatan Bangko. Kota ini terletak di Muara Sungai Rokan, di pesisir paling utara Rokan Hilir, dan merupakan tempat yang sangat strategis. Pusat pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir terletak ditengah tengah kota, tepatnya di Jalan Merdeka No. 58 di Bagansiapiapi.

Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.941 km² yang terletak pada koordinat 1014' sampai 2045' lintang utara & 100017' hingga 101021' Bujur Timur, dan penduduk sejumlah 349.771 jiwa. Batas Kabupaten Rokan Hilir :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai

Rokan Hilir terbagi dalam 14 kecamatan dan 83 desa. Adapun 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

1. Kecamatan Bangko
2. Kecamatan Sinaboi

3. Kecamatan Rimba Melintang
4. Kecamatan Bangko Pusako
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
6. Kecamatan Tanah Putih
7. Kecamatan Kubu
8. Kecamatan Bagan Sinembah
9. Kecamatan Pujud
10. Kecamatan Simpang Kanan
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas
12. Kecamatan Batu Hampar
13. Kecamatan Rantau Kopar
14. Kecamatan Pekaitan

Menurut sejarah Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah Indonesia merdeka, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten baru di Propinsi Riau sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1999. sebagai ibukota di tetapkan di Bagansiapiapi.

Kabupaten Rokan Hilir dengan Ibu Kota “Bagan Siapi-api” terletak disebelah timur Sungai Rokan. Tempat ini merupakan sebuah perkampungan ikan yang berada pada pantai timur pulau Sumatera. Hasil produksinya seperti Ikan Asin dan Udang diekspor keseluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kota lain yang berperan penting di Kabupaten ini adalah Bagan Batu yaitu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten ini berperan penting sebagai sarana transportasi untuk perekonomian rakyat. Sungai Rokan merupakan sungai terpanjang dengan panjang 350 km.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki iklim tropis dengan jumlah curah hujan 1.808,5 mm/tahun dan temperatur udaranya berkisar pada 24°-32°C. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Februari s/d bulan Agustus. Sementara musim hujan terjadi pada bulan September s/d Januari dengan jumlah rata-rata hujan 69 hari, curah hujan tertinggi adalah di Kecamatan Bangko, yaitu 2.710 mm/tahun dan curah hujan terendah di Kecamatan Tanah Putih dengan jumlah 1.443,8 mm/tahun. (BPS, 2006).

4.2. Demografi Kabupaten Rokan Hilir

Sejak berlakunya otonomi daerah, Kabupaten Rokan Hilir telah mencoba untuk mempersiapkan sarana dan infrastruktur baru seperti:

- a. Transportasi Darat (1.828 km mudah diakses dengan kendaraan roda empat)
- b. Transportasi Udara (4 pelabuhan ekspor-impor), pada 4 lokasi yaitu; Bagan Siapi-api, Panipahan, Tanjung Lumba-lumba dan Sinaboi

- c. Listrik – 26 unit pembangkit listrik tenaga diesel dengan total kapasitas 29.372.616 kWh
- d. Telekomunikasi (telepon rumah, telepon genggam dan internet)
- e. Fasilitas Kesehatan (3 Rumah Sakit, 10 Puskesmas, dan 58 Puskesmas Pembantu)
- f. Air bersih, dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Mineral (PDAM) dengan jumlah volume 9.840 m³
- g. Fasilitas pendukung; Perbankan (Bank Nasional dan Bank Lokal), Akomodasi (Hotel dan Fasilitas Pemondokan)

4.3. Pariwisata

Kabupaten Rokan Hilir memiliki beberapa pariwisata andalan, antara lain :

4.3.1. Festival Bakar Tongkang

Upacara Bakar Tongkang adalah wisata budaya unggulan Provinsi Riau dari Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Upacara Bakar Tongkang telah menjadi wisata nasional bahkan internasional. Upacara Bakar Tongkang adalah upacara tradisional masyarakat Tionghoa di Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir yakni Bagansiapiapi.

Ritual Bakar Tongkang merupakan kisah pelayaran masyarakat keturunan Tionghoa yang melarikan diri dari si penguasa Siam pada abad ke-19. Didalam kapal yang di pimpin Ang Mie Kui, terdapat patung Dewa Kie Ong Ya dan lima dewa, dimana panglimanya disebut Taisun Ong Ya. Patung -patung dewa ini mereka bawa dari tanah Tiongkok, dan menurut keyakinan mereka bahwa dewa

tersebut akan memberikan keselamatan dalam pelayaran, hingga akhirnya mereka menetap di Bagansiapiapi.

Untuk menghormati dan mensyukuri kemakmuran dan keselamatan yang mereka peroleh dari hasil laut sebagai mata pencaharian utama masyarakat Tionghoa Bagansiapiapi, maka mereka membakar wangkang (tongkang) yang dilakukan setiap tahun. Sedangkan prosesi sembahyang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 bulan 5 tahun Imlek.

Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa ritual Bakar Tongkang adalah ritual pemujaan untuk memperingati hari ulang tahun Dewa Kie Ong Ya (Dewa Laut). Upacara ini memiliki ciri khas tersendiri dan tidak dapat ditemui di tempat lain di Indonesia.

Pada zaman Soeharto upacara seperti ini sempat dilarang tetapi kemudian diaktifkan kembali di era Gus Dur sampai sekarang ini.

4.3.2. Pulau Jemur

Pulau Jemur adalah gugusan kepulauan yang terletak di Selat Malaka, tepatnya di tengah-tengah antara perbatasan Indonesia dan Malaysia. Keindahan alam Pulau Jemur sangat memukau namun potensi tersebut masih tengah digarap.

4.4. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksanaan pendidikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti tenaga pendidik, sekolah, guru, tata usaha, siswa, dan sebagainya yang berhubungan dengan pendidikan.

Dinas pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Dinas Pendidikan kabupaten Rokan Hilir mempunyai 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Sekretaris, yang di pimpin oleh Bapak H. Azwar, S.Pd, M.Si
2. Bidang Kurikulum, yang di pimpin oleh Bapak Drs. Khairul Azam
3. Bidang Pendidikan, yang di pimpin oleh Bapak Syahrudin, S. Pd
4. Bidang Sarana dan Prasarana, yang di pimpin oleh Ibu Badriani, S. Pd
5. Bidang Tendik, yang di pimpin oleh Bapak Drs. H. Sulbani.

4.5. Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

Kedudukan Dinas pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir No. 5 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksanaan pendidikan dalam Kabupaten Rokan Hilir
2. Dinas Pendidikan di pimpin oleh kepala Dinas Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada daerah melalui sekretaris dewan.

Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pendidika Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan

- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pembinaan terhadap cabang Dinas di bidang pendidikan
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas

Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan fungsinya adalah :

1. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan dan mempertanggungjawabkan program kerja
2. Mempersiapkan rencana dan program serta melakukan pembinaan dan pengurusan taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan umum meliputi kepegawaian, sarana, prasarana, keuangan, dan kegiatan teknis di jajaran Dinas Pendidikan.
4. Mempersiapkan penyusunan anggaran dan pembangunan di lingkungan Dinas Pendidikan
5. Mengkoordinasikan dan mengendalikan bagian dan bidang dinas yang berada di wilayah kerjanya
6. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.
7. Membina dan meningkatkan mutu lembaga pendidikan
8. Melaksanakan hubungan kerja sama di bidang pendidikan dengan instansi/lembaga dalam dan luar negeri

9. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah swasta yang berhubungan dengan pendidikan
10. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijakan dan petunjuk pemerintah daerah
11. Memberi saran pertimbangan dan informasi mengenai situasi pendidikan sebagai bahan menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan
12. Melaksanakan tugas lain yang di beri Bupati
13. Menyusun laporan Dinas Pendidikan.

4.6. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

Sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hilir No. 5 Tahun 2002 tentang *“Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir”* maka sususnan unit kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

I. DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pengkoordinasikan, kebijakan pelayanan di bidang Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.

Adapun fungsi dinas Pendidikan seperti yang tercantum pada ayat (1) yaitu :

- a. Perumuskan Visi dan Misi dinas untuk mendukung Visi dan Misi Daerah

- b. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai dengan bidangnya.
- c. Penetapan rencana strategis dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi dan misi daerah.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan pelaksanaan program kerja dan kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- e. Penetapan Pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang tugasnya.
- f. Pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Dinas.
- g. Pembinaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah.
- h. Pendelegasian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen.
- i. Pembinaan, Pengembangan dan pengawasan UPTD dalam lingkungan Dinas.
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas dinas.
- k. Pelaksanaan koordinasi hubungan kerjasama antar lembaga/instansi terkait, badan usaha dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas.
- l. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- m. Penyampaian laporan pertanggung jawaban tugas Dinas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, termasuk RENSTRA, LAKIP, LKPI sesuai dengan bidang dan tugasnya.

II. SEKRETARIAT

1. Tugas

Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas menyelenggarakan pelaksanaan tugas pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian keuangan dan perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris dinas mempunyai rincian tugas yaitu :

- a. Memelihara dan memanfaatkan barang Inventaris Dinas.
- b. Menelaah dan mengkaji konsep tata naskah dinas dan produk hukum
- c. Menyelenggara pelayanan kehumasan.
- d. Menyiapkan kegiatan rapat dan kegiatan lainnya pada dinas.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- f. Menyusun pedoman petunjuk teknis kegiatan UPTD.
- g. Menyiapkan bahan laporan Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala
- i. Menyusun program kerja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
- j. Menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA, LAKIP, dan LKPD Dinas sesuai bidang tugasnya.

2. Fungsi

Adapun fungsi sekretaris dinas pendidikan yaitu :

- a. Penyiapan bahan Visi dan Misi Dinas
- b. Perumusan program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi.

- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis.
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan program,
- e. Penyiapan bahan Referensi kegiatan.
- f. Pembinaan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan program.
- g. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan belanja umum dan kepegawaian.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian tugasnya adalah membantu sekretaris melaksanakan penyelenggaraan ketatausahaan, dan administrasi kepegawaian. Rincian tugasnya adalah :

- 1. Menyusun rencana kerja sesuai visi dan misi Dinas.
- 2. Melayani masalah ketatausahaan
- 3. Menyusun rencana kebutuhan alat dan dan perlengkapan dinas.
- 4. Mendistribusikan barang keperluan dinas.
- 5. Memlihara, mengendalikan, memanfaatkan serta penghapusan barang inventaris dinas.
- 6. Memelihara kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruang perkantoran dinas.
- 7. Menyusun bahan-bahan penelaahan konsep tata naskah Dinas dan produk hokum dalam lingkup dinas.
- 8. Menyusun bahan-bahan penelaahan konsep tata naskah Dinas dan produk hokum dalam lingkup dinas.

9. Menyelenggarakan tata laksana perkantoran Dinas
10. Mengelola administrasi perjalanan Dinas
11. Mengelola ruang sesuai dengan kebutuhan dinas
12. Menyelenggarakan kehumasan.
13. Mengelola urusan administrasi kepegawaian.
14. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
15. Menyiapkan urusan Administrasi Kepegawaian, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kepangkatan, DUK, DP3, pengurusan kenaikan gaji berkala, Kartu Pegawai, Taspen, Asuransi, Karis/Karsu, Perumahan, Daftar hadir, cuti, Disiplin Pegawai, Pengusulan Mutasi dan Pensiun, serta Angka Kredit Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya. Pengirimannya.
16. Menyiapkan ruang rapat serta perlengkapannya.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala sub bagian keuangan tugasnya menyiapkan bahan pelayanan dan pengendalian dalam urusan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan anggaran, penggajian, perbendaharaan, dan peloran pertanggungjawaban. Adapun perincian tugasnya yaitu :

1. Menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan sub bagian.
2. Menyusun rencana anggaran belanja dinas, penggajian pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Menyusun dan melaksanakan administrasi penerimaan dan pengeluaran dana dinas.
4. Melakukan pembinaan terhadap bendahara pembantu.

5. Melaksanakan pembukuan dan, verifikasi dan pembinaan Bendahara.
6. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai.
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris
9. Menyusun laporan secara berkala

5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program memiliki tugas membantu sekretaris menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Adapun rincian tugasnya yaitu :

1. Menyiapkan bahan penyusunan Visi dan Misi Dinas
2. Menyusun kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program
3. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas.
4. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dinas.
5. Menyiapkan bahan, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas.
6. Menghimpun permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan.
7. Menghimpun, mengolah dan menyampaikan data laporan hasil kegiatan Dinas.
8. Menyusun laporan secara berkala
9. Menyusun Program Kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang

10. Mengumpulkan bahan dan menyusun RENSTRA, LAKIP, LKPJ, RKA, DPA, DPAL, LPPD, ILPTD, SPM dinas sesuai bidang tugasnya.
11. Menyusun dan Mengusulkan fisik dan mobiler sekolah

III. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN

1. Tugas

Bidang pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

2. Fungsi

Adapun fungsinya yaitu :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang sesuai Visi dan Misi Dinas.
- b. Perumusan penjabaran kebijakan teknis Dinas Bidang Pendidikan yang meliputi Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas seksi dibawahnya.
- d. Pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada seksi dibawahnya.
- e. Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan
- f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

- g. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan kebijakan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kelembagaan serta kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah.
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah.

3. Rincian Tugas

Rincian tugas Kepala Bidang Kependidikan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pertimbangan rekomendasi pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah.
- c. Melaksanakan peningkatan akses dan pemerataan serta kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah.
- d. Memantapkan peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan perencanaan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun.
- e. Menyiapkan pemberian izin penyelenggaraan sekolah.
- f. Menyelenggarakan akreditasi sekolah dan PLS
- g. Menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian kegiatan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan luar sekolah.

- h. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup bidang tugasnya.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- k. Menyiapkan bahan laporan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

4. Kepala Seksi Pendidikan Dasar

Kepala Seksi Pendidikan Dasar tugasnya yaitu membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang pembinaan kelembagaan, pengurusan dan pembinaan satuan pendidika yang meliputi Pendidikan Dasar SD/MI, SMP/MTs. Adapun rincian tugasnya yaitu :

- 1. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, data dan informasi dibidang pendidikan dasar
- 2. Menyusun petunjuk teknis dibidang pendidikan dasar
- 3. Melaksanakan pembinaan pengurusan kelembagaan pendidikan dasar.
- 4. Melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kelembagaan pendidikan dasar.
- 5. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kelembagaan pendidikan dasar.
- 6. Mengendalikan kegiatan penilaian akreditasi pendidikan dasar.
- 7. Menyiapkan bahan persyaratan izin operasional, penegerian sekolah, NPSN, NISN, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dasar.
- 8. Melaksanakan dan pengurusan bea siswa sekolah dasar

9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Bidang.
10. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

5. Kepala Seksi Pendidikan Menengah

Kepala Seksi Pendidikan Menengah tugasnya yaitu membantu Kepala Bidang dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, pengurusan dan pembinaan satuan pendidikan menengah yang meliputi, Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Adapun rincian tugasnya yaitu :

1. Menyusun rencana kerja seksi sesuai visi dan misi Dinas
2. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi dibidang pendidikan menengah
3. Menyusun petunjuk teknis dibidang pendidikan menengah
4. Melaksanakan pembinaan pengurusan kelembagaan pendidikan menengah.
5. Melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kelembagaan pendidikan menengah
6. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kelembagaan pendidikan menengah
7. Mengendalikan kegiatan penilaian akreditasi pendidikan menengah.
8. Menyiapkan bahan persyaratan izin operasional, penegerian sekolah, NPSN, NISN, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan menengah.
9. Menyusun dan mengusulkan bea siswa untuk pendidikan menengah.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

11. Menyiapkan bahan laporan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
12. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

6. Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Luar Biasa

Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Luar Biasa tugasnya adalah membantu Kepala Bidang dalam penyusunan kebijakan teknis, pengurusan dan pembinaan satuan pendidikan non formal, informal, dan pendidikan luar sekolah.

Adapun rincian tugasnya yaitu :

1. Menyusun rencana kerja seksi sesuai Visi dan Misi Dinas.
 1. Merumuskan penjabaran kebijakan teknis seksi.
 2. Mengkoordinasi, membina dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan tugas seksi.
 3. Pelaksanaan administratif dan operasional tugas seksi.
 4. Memberi pelayanan kepada masyarakat umum sesuai dengan tugas seksi.
 5. Melaksanakan kebijakan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman di bidang pendidikan masyarakat sesuai tugas seksi.
 6. Melaksanakan peningkatan akses, pemerataan pelayanan pendidikan sesuai tugas seksi.
 7. Melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan sesuai dengan tugas seksi.
 8. Melaksanakan Kurikulum Nasional pendidikan sesuai tugas seksi.
 9. Menetapkan implementasi Kurikulum Muatan Lokal.
 10. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan berbasis masyarakat.

11. Menetapkan syarat dan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan sesuai tugas seksi.
12. Melaksanakan akreditasi lembaga pendidikan sesuai tugas seksi.
13. Melaksanakan penilaian hasil belajar, pengujian, uji kompetensi dan sertifikasi pendidikan sesuai tugas seksi.
14. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya.
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
17. Menyiapkan bahan laporan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
18. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

IV. KEPALA BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tugas

Bidang Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis pengurusan dan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.

2. Fungsi

Kepala Bidang Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang sesuai Visi dan Misi Dinas.
- b. Perumusan penjabaran kebijakan teknis Dinas dibidang Tenaga Kependidikan.
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas seksi dibawahnya.
- d. Pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada ;
seksi dibawahnya.
- e. Pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan.
- g. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan kebijakan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur, serta pedoman Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

3. Rincian Tugas

Kepala Bidang Pendidikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Menyusun rencana strategis bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- c. Melaksanakan peningkatan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- d. Memberikan rekomendasi dan pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi sekolah Negeri dan Swasta.
- e. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat Daerah terkait.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Menyiapkan bahan laporan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

4. Kepala Seksi Data dan Informasi Tenaga Kependidikan

Kepala Seksi Data dan Informasi Tenaga Kependidikan memiliki tugas yaitu membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan dasar, pendidikan Luar Biasa. Adapun rincian tugasnya adalah :

- 1. Menyusun rencana kerja Seksi sesuai Visi dan Misi Dinas
- 2. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 3. Menyusun rencana program dan Sistem Informasi Manajemen (SIM), Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 4. Melaksakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 5. Menyiapkan bahan laporan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

5. Kepala Seksi Pengembangan dan Tenaga Kependidikan

Kepala Seksi Pengembangan dan Tenaga Kependidikan memiliki tugas yaitu membantu kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Luar Sekolah, dan Pendidikan Luar Biasa. Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Seksi sesuai Visi dan Misi Dinas
2. Melakukan pembinaan teknis terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Mengkordinir pelaksanaan teknis pelatihan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Menyiapkan dukungan kerjasama antar Kabupaten/ Kota dalam peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Memberikan masukan pertimbangan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan
6. Memfasilitasi pelaksanaan kualifikasi, uji kompetensi dan sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan
7. Melaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
8. Menyiapkan bahan laporan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

6. Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kepala Seksi Evaluasi kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, Pendidikan

Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa. Adapun rincian tugasnya yaitu :

1. Menyusun rencana kerja Seksi sesuai Visi dan Misi Dinas
2. Mengkoordinir penyusunan rencana dan program, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
5. Menyiapkan bahan laporan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

V. KEPALA BIDANG KURIKULUM PENDIDIKAN

1. Tugas

Bidang Kurikulum Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan dinas dalam menyusun kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis pengurusan dan pembinaan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar sekolah, dan Pendidikan Luar Biasa.

2. Fungsi

Kepala Bidang Kurikulum Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang sesuai visi dan misi Dinas

- a. Perumusan penjabaran kebijakan teknis Dinas dibidang Kurikulum Pendidikan.
- b. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas seksi dibawahnya.
- c. Pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada seksi dibawahnya.
- d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang kurikulum pendidikan.
- e. Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan.
- f. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kurikulum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan kebijakan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur, serta pedoman kelembagaan dan kurikulum pendidikan.
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan kurikulum pendidikan.
- i. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis bidang kurikulum pendidikan.
- j. Pelaksanaan peningkatan mutu dan relevansi serta mutu pengelolaan kurikulum pendidikan.

3. Rincian Tugas

Kepala Bidang Kurikulum Pendidikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS).

- b. Melaksanakan Kurikulum Nasional.
- c. Menyiapkan, menyusun dan implementasi kurikulum muatan lokal.
- d. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan melakukan bimbingan serta pembinaan.
- e. Menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian kegiatan kurikulum pendidikan.
- f. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait/lembaga pendidikan
- g. Melaksanakan kegiatan lomba
- h. Menyusun rencana pengadaan buku dan media pembelajaran.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- k. Menyiapkan bahan laporan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

4. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan

Kepala Seksi Kurikulum pendidikan memiliki tugas Membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang Kurikulum Pendidikan evaluasi, pendidikan dasar, menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Luar Biasa. Adapun rincian tugasnya yaitu :

1. Menyusun rencana kerja seksi sesuai visi dan misi Dinas

2. Mengumpulkan, pengolahan, penganalisaan, data dan informasi pelaksanaan kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa
3. Menyusun bahan petunjuk teknis kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.
4. Melaksanakan pembinaan pengurusan kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa
5. Melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.
6. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kelembagaan dan kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.
7. Melaksanakan kegiatan peningkatan standar mutu kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.
8. Melaksanakan penilaian hasil belajar semester, ujian akhir baik nasional maupun sekolah untuk Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa
10. Menyusun kalender pendidikan

11. Merencanakan dan Mengebangkan SSN, RSBI/SBI dan Sekolah Kategori Mandiri
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang :
13. Menyiapkan bahan laporan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
14. Meyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

5. Kepala Seksi Pengadaan Buku dan Media Pembelajaran

Kepala Seksi Pengadaan Buku dan Media Pembelajaran tugasnya yaitu membantu kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang pengadaan buku dan media pembelajaran untuk Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, dan Pendidikan Luar Biasa. Adapun rincian tugasnya yaitu :

1. Menyusun rencana kerja seksi sesuai visi dan misi Dinas
2. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi pengadaan buku dan media pembelajaran untuk Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa
3. Menyusun bahan petunjuk teknis pengadaan buku dan media pembelajaran Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.
4. Melaksanakan standarisasi pengadaan buku dan media pembelajaran untuk Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.

5. Mengkaji, mendayagunakan, dan meningkatkan pengadaan buku dan media pembelajaran Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
7. Menyiapkan bahan laporan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

6. Kepala Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

Kepala Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum tugasnya yaitu membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang evaluasi dan pengembangan kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa. Adapun rincian tugasnya adalah :

1. Menyusun rencana kerja seksi sesuai visi dan misi Dinas
2. Menyiapkan, menyebarluaskan pedoman, petunjuk pelaksanaan evaluasi dan pengembangan kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.
3. Menyusun Pedoman penerimaan siswa baru pada Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.
4. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil ujian Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.
5. Membina, Mengembangkan, melaksanakan kegiatan Lomba/Olimpiade pendidik dan siswa
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
7. Menyiapkan bahan laporan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

VI. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

1. Tugas

Bidang Sarana dan Prasana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Melaksanakan kewenangan dinas dalam penyusunan kebijakan teknis dan pengurusan yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan inventarisasi & dokumentasi sarana prasarana pendidikan dasar, menengah, pendidikan luar sekolah dan pendidikan luar biasa.

2. Fungsi

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang sesuai visi dan misi Dinas
- b. Perumusan kebijakan teknis dinas bidang sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Pemberian petunjuk administratif dan operasional, Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas seksi dibawahnya.
- d. Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan.
- e. Pemberian pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha, industri dibidang sarana dan prasarana pendidikan.
- f. Pelaksanaan pengurusan dan pembinaan bidang sarana dan prasarana pendidikan.
- g. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana dalam rangka wajib belajar, peningkatan akses dan pemerataan sarana dan prasana pendidikan.

- h. Pengkoordinasian kebutuhan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, inventarisasi & dokumentasi sarana dan prasarana.
- i. Penyiapan usul dan rencana pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

3. Rincian Tugas

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan, penerapan, pendayagunaan, pemanfaatan teknologi, peralatan dan media pendidikan.
- 2. Menyusun standarisasi sarana dan prasarana kantor dinas, UPTD dan sekolah.
- 3. Melaksakan pengawasan, pengendalian serta evaluasi kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- 4. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait.
- 5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 6. Menyiapkan bahan laporan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- 7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

4. Kepala Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kepala Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan memiliki tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah, pendidikan luar sekolah dan pendidikan luar biasa. Adapun rincian tugasnya yaitu :

- 1. Menyusun rencana kerja seksi sesuai visi dan misi Dinas

2. Mengumpulkan, pengolahan, penganalisaan data bidang sarana dan prasarana pendidikan.
3. Menyusun petunjuk teknis bidang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Melaksanakan usul dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Melaksanakan standarisasi dan spesifikasi sarana dan prasarana pendidikan.
6. Mendayagunakan dan Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
7. Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif dibidang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala bidang
10. Menyiapkan bahan laporan Kepala bidang sesuai bidang tugasnya.
11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

5. Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Pendidikan

Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Pendidikan tugasnya yaitu membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah, pendidikan luar sekolah dan pendidikan luar biasa. Adapun rincian tugasnya yaitu :

1. Menyusun rencana kerja seksi sesuai visi dan misi Dinas
2. Mengusulkan, Melaksakan perbaikan/rehabilitasi, memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
3. Mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan.

4. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dibidang dan perbaikan/rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Mengkoordinasikan kebutuhan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala bidang
7. Menyipkan bahan laporan Kepala bidang sesuai bidang tugasnya.
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

6. Kepala Seksi Inventarisasi & Dokumentasi

Kepala Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi memiliki tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang inventarisasi dan dokumentasi sara dan prasarana Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa. Adapun rincian tugasnya yaitu :

1. Menyusun rencana kerja seksi sesuai visi dan misi Dinas
2. Melaksanakan pendataan inventaris sarana dan prasarana pendidikan.
3. Melaksanakan pencatatan, pengkodean barang inventaris & dokumentasi sarana dan prasarana pendidikan.
4. Melaksanakan dan menyiapkan bukti tanda terima barang/sarana dan prasarana bidang pendidikan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala bidang
6. Menyiapkan bahan laporan Kepala bidang sesuai bidang tugasnya.
7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, khususnya di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Maka dalam penelitian ini akan menjelaskan variabel-variabel penelitian yaitu Penerapan Standar Pelaksanaan, Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Membandingkan Hasil Pengukuran dengan Standar, dan Pengambilan Korektif. Dalam pembahasan awal akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini.

5.1. Karakteristik Responden

Secara umum karakteristik subjek dalam penelitian ini yaitu pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan guru yang mata pelajarannya diujikan nasionalkan. Sedangkan karakteristik secara khusus meliputi usia, masa kerja responden, jenis kelamin, status sipil, dan tingkat pendidikan terakhir responden.

5.1.1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Usia merupakan salah satu identitas yang dapat memberikan petunjuk untuk mengetahui kemampuan fisik dan kemampuan daya pikir seseorang. Semakin tua usia seseorang semakin tinggi tingkat kematangan berfikirnya dalam proses pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Pada usia produktif sangat

memungkinkan seseorang untuk mencapai kinerja dan meningkatkan pengawasan, karena masih didukung oleh kekuatan fisik dan energi yang menunjang untuk menjalankan aktivitas pengawasan serta bimbingan terhadap poses belajar mengajar siswa.

Untuk melihat secara keseluruhan mengenai tingkat usia rata-rata responden dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1 : Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Umur Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Prosentase (%)
1	30 - 39	16	39.02 %
2	40 - 49	17	41.46 %
3	50 - 59	8	19.52 %
Total		41	100 %

Sumber : Data Penelitian Lapangan Tahun, 2011

Dari tabel 5.1 dapat dijelaskan bahwa responden paling banyak berusia antara 40 – 49 tahun dengan jumlah 17 orang atau 41.46 %, sementara yang berusia antara 30 – 39 tahun berjumlah 16 % atau 39.02 %, akan tetapi yang berusia antara 50 – 59 tahun hanya berjumlah 8 orang atau 19.52 %. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi usia responden terkonsentrasi pada usia 40 – 49 tahun atau masih dalam kategori usia produktif.

5.1.2. Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja

Lamanya seseorang dalam bekerja akan mempengaruhi profesionalisme pegawai dalam bekerja. Sebab semakin lama seseorang itu menduduki masa kerjanya maka semakin banyak pula pengalaman-pengalaman yang mereka miliki,

sehingga dalam menjalankan sistem pengawasan dapat berjalan dengan baik. sebaliknya pegawai yang yang masa bekerjanya masih baru, maka akan sedikit pengalaman yang mereka dapatkan. Sehingga mereka belum paham betul dengan sistem pengawasan yang akan dilakukannya.

Untuk melihat secara keseluruhan mengenai masa kerja responden dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5.2 : Distribusi Frekuensi Responden Menurut Masa Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

No	Masa Kerja	Frekuensi	Prosentase (%)
1	1-10 Tahun	19	46.34 %
2	11-20 Tahun	10	24.39 %
3	21-30 Tahun	12	29.27 %
Total		41	100 %

Sumber : Data Penelitian Lapangan Tahun, 2011

Dari tabel 5.2 dapat dijelaskan bahwa paling banyak responden yang masa kerjanya antara 1-10 tahun berjumlah 19 orang atau 46.34 %, kemudian masa kerja responden antara 21-30 tahun berjumlah 12 orang atau 29.27 %, dan yang paling sedikit masa kerja responden antara 11-20 tahun yaitu dengan jumlah 10 orang atau 24.39 %.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa masa kerja responden paling banyak berjumlah 19 orang atau 46.34 % yaitu lamanya antara 1-10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir masa kerjanya masih berusia muda sehingga pengalaman kerja pegawai dalam melakukan pengawasan terhadap sekolah masih kurang atau masih rendah.

5.1.3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini adalah pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan guru SMPN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang mata pelajarannya di ujian nasionalkan. Untuk melihat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 5.3 : Distribusi Frekuensi Menurut Jenis Kelamin Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Laki – laki	24	58.54 %
2	Perempuan	17	41.46 %
Total		41	100 %

Sumber : Data Penelitian Lapangan Tahun, 2011

Berdasarkan pada tabel 5.3 diatas, dapat dilihat bahwa jenis kelamin pada responden dalam penelitian ini didominasi pada laki-laki yaitu berjumlah 24 orang atau 58.54 % sedangkan perempuan berjumlah 17 orang atau 41.46 %. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakuka oleh Dinas Pendidikan, karena pada umumnya ketahanan fisik laki-laki lebih kuat dalam menjalankan tugas nya sebagai pengawas sekolah daripada ketahanan fisik perempuan.

5.1.4. Identitas Responden Berdasarkan Status Sipil

Status sipil juga akan mempengaruhi kinerja pegawai, sebab apabila pegawai tersebut berstatus menikah maka tugas dan tanggung jawabnya akan terbagi dengan tanggung jawab keluarga. Lain halnya denga pegawai yang belum

menikah, mereka dalam bekerja akan terfokuskan pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sebagai pengawas sekolah.

Untuk melihat karakteristik responden berdasarkan status sipil, dapat dilihat pada tabel 5.4 dibawah ini :

Tabel 5.4 : Distribusi Frekuensi Menurut Status Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

No	Status Sipil	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Menikah	41	100 %
2	Belum Menikah	-	0 %
Total		41	100 %

Sumber : Data Penelitian Lapangan Tahun, 2011

Berdasarkan tabel 5.4 diatas, dapat dilihat bahwa status sipil responden semuanya berstatus sudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab pegawai tersebut akan terbagi kedalam tugas dan tanggung jawab dalam keluarga.

5.1.5. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam segala bidang, terutama dalam dunia kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka sangat diharapkan semakin tinggi pula ilmu dan skill yang dimiliki pegawai tersebut. Sehingga pada gilirannya dapat menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada para pegawai mendapatkan hasil yang optimal.

Dalam hal ini, tingkat pendidikan terakhir responden, peneliti dapat menguraikan pada tabel 5.5 di bawah ini :

Tabel 5.5 : Distribusi Frekuensi Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir Responden Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

No	Pendidikan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	SLTA	12	29.27 %
2	Diploma	5	12.19 %
3	Strata Satu (S1)	22	53.66 %
4	Strata Dua (S2)	2	4.88 %
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Penelitian Lapangan Tahun, 2011

Berdasarkan tabel 5.5 diatas, dapat dilihat tingkat pendidikan terakhir responden didominasi oleh tamatan Strata satu (S1) yaitu berjumlah 22 orang atau 53.66 %, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan jumlah 12 orang atau 29.27 %. Sementara Diploma (D3) berjumlah 5 orang atau 12.19 %, dan yang paling sedikit tingkat pendidikannya yaitu pada tingkat pendidikan Strata Dua (S2) dengan jumlah 2 orang atau 4.88 %. Dengan demikian tingkat pendidikan terakhir responden pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan didominasi oleh tamatan Strata Satu (S1). Hal ini sangat menguntungkan karena tingkat pendidikan dapat mempengaruhi profesionalisme dan kualitas kerja pegawai.

5.2. Penyajian Data Tentang Pengawasan Dinas Pendidikan Dalam Proses Belajar Mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Dari berbagai pengertian tentang pengawasan, yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui dengan jelas bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Suatu organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan direncanakan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, sebab pengawasan berupaya membetulkan kesalahan-kesalahan atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam organisasi. Pengawasan men-cek apakah pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan arah tujuan yang sudah ditetapkan, pengawasan meliputi aspek penelitian apakah hasil yang telah dicapaitelah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta pengawasan berguna untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan.

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, penulis menggunakan angket yang disebarakan kepada

pengawas Dinas Pendidikan dan guru yang mata pelajarannya di ujian nasionalkan.

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan ingin mengetahui bagaimana hubungan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan terhadap prosentase kelulusan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu variabel yang akan diteliti. Adapun variabel yang akan diteliti adalah pengawasan Dinas Pendidikan dengan indikator yaitu penerapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, membandingkan hasil pengukuran dengan standar, dan pengambilan korektif.

Dalam penelitian ini bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan peneliti melalui kuisioner dan wawancara. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pengawas Dinas Pendidikan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan guru SMPN 1 Bangko yang mata pelajarannya diujikan nasionalkan.

1. Penerapan Standar Pelaksanaan

Penerapan standar pelaksanaan mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, dan target pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai standar.

Dibawah ini adalah tanggapan responden mengenai penerapan standar pelaksanaan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.6 dibawah ini.

Tabel 5.6 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan aktif mengawasi, memberi pengarahan atau bimbingan kepada guru dalam melakukan proses belajar mengajar siswa didalam kelas.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	8	19.5 %
2	Sering	6	14.64 %
3	Kadang-kadang	25	60.98 %
4	Jarang	1	2.44 %
5	Tidak pernah	1	2.44 %
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2011

Dari tabel 5.6 diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai apakah Dinas Pendidikan aktif mengawasi, memberi pengarahan atau bimbingan kepada guru dalam melakukan proses belajar mengajar siswa didalam kelas yang menjawab selalu berjumlah 8 orang atau 19.5 %, yang menjawab sering berjumlah 6 orang atau 14.64 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 25

orang atau 60.98 %, yang menjawab jarang berjumlah 1 orang atau 2.44 %, dan yang menjawab tidak pernah berjumlah 1 orang atau 2.44 %.

Berdasarkan tabel 5.6 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi oleh jawaban kadang-kadang, artinya dalam hal ini pengawas Dinas Pendidikan kadang-kadang aktif mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru dalam melakukan proses belajar mengajar siswa didalam kelas. Dengan arti kata bahwa Dinas Pendidikan aktif mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru dalam melakukan proses belajar mengajar siswa didalam kelas dapat dikategorikan cukup baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengarahkan guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 5.7 dibawah ini :

Tabel 5.7 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengarahkan guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	9	21.95 %
2	Sering	22	53.66 %
3	Kadang-kadang	8	19.51 %
4	Jarang	1	2.44 %
5	Tidak pernah	1	2.44 %
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.7 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengarahkan guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, responden yang menjawab

selalu berjumlah 9 orang atau 21.95 % yang menjawab sering berjumlah 22 orang atau 53.66 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 8 orang atau 19.51 %, dan yang menjawab jarang berjumlah 1 orang atau 2.44 %, serta yang menjawab tidak pernah berjumlah 1 orang atau 2.44 %.

Berdasarkan tabel 5.7 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban sering, artinya bahwa Dinas Pendidikan sering mengarahkan guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi dalam hal ini dinas Pendidikan mengarahkan guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dapat dikatakan sudah baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru, dapat dilihat pada tabel 5.8 dibawah ini :

Tabel 5.8 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	12	29.27 %
2	Sering	18	43.90 %
3	Kadang-kadang	9	21.95 %
4	Jarang	2	4.88 %
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.8 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengawasi, memberi pengarahan, atau

bimbingan kepada guru yang menjawab selalu berjumlah 12 orang atau 29.27 %, yang menjawab sering berjumlah 18 orang atau 43.90 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 9 orang atau 21.95 %, yang menjawab jarang berjumlah 2 orang atau 4.88 %, dan tidak ada satupun responden yang menjawab tidak pernah.

Berdasarkan tabel 5.8 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban sering, artinya bahwa Dinas Pendidikan sering mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru. Jadi dalam hal ini Dinas Pendidikan mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru tergolong dalam kategori baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai apakah pengawas melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah apakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, dapat dilihat pada tabel 5.9 dibawah ini :

Tabel 5.9 : Tanggapan responden mengenai apakah pengawas melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah apakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	16	39.02 %
2	Sering	20	48.78 %
3	Kadang-kadang	5	12.20 %
4	Jarang	-	-
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.9 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah pengawas melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah apakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Dalam hal ini

yang menjawab selalu berjumlah 16 orang atau 39.02 %, yang menjawab sering berjumlah 20 orang atau 48.78 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 5 orang atau 12.20 %, namun dari hasil pertanyaan ini tidak ada satupun responden yang menjawab jarang dan tidak pernah.

Berdasarkan tabel 5.9 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban sering, artinya bahwa dinas Pendidikan sering melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi, dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas pendidikan tergolong kedalam kategori baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan menerapkan standar pelaksanaan pengawasan dengan baik dalam melakukan pengawasan dapat dilihat pada tabel 5.10 dibawah ini :

Tabel 5.10 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan menerapkan standar pelaksanaan dengan baik dalam melakukan pengawasan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	11	26.83 %
2	Sering	18	43.90 %
3	Kadang-kadang	10	24.39 %
4	Jarang	2	4.88 %
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.10 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan menerapkan standar pelaksanaan dengan baik dalam melakukan pengawasan, responden yang menjawab selalu berjumlah 11 orang atau 26.83 %, yang menjawab sering berjumlah 18 orang atau 43.90 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 10 orang atau 24.39 %, yang menjawab jarang berjumlah 2 orang atau 4.88 %, dan tidak ada satupun responden yang menjawab tidak pernah.

Berdasarkan tabel 5.10 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban sering, artinya bahwa dinas Pendidikan sering menerapkan standar pelaksanaan dengan baik dalam melakukan pengawasan. Jadi dalam hal ini pernyataan tersebut tergolong kedalam kategori baik.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana penerapan standar pelaksanaan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel rekapitulasi 5.11 dibawah ini :

Tabel 5.11 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penerapan Standar Pelaksanaan

No	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	jarang	Tidak pernah	
1	Apakah Dinas Pendidikan aktif mengawasi, memberi pengarahan atau bimbingan kepada guru dalam melakukan proses belajar mengajar siswa didalam kelas	8	6	25	1	1	41
		19.5 %	14.64 %	60.98 %	2.44 %	2.44 %	100 %
2	Apakah Dinas Pendidikan selalu mengarahkan guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	9	22	8	1	1	41
		21.95 %	53.66 %	19.51 %	2.44 %	2.44 %	100 %
3	Apakah Dinas Pendidikan mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru	12	18	9	2	-	41
		29.27 %	43.90 %	21.95 %	4.88 %	-	100 %
4	Apakah pengawas melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan	16	20	5	-	-	41
		39.02 %	48.78 %	12.20 %	-	-	100 %
5	Apakah Dinas pendidikan menerapkan standar pelaksanaan pengawasan dengan baik dalam melakukan pengawasan	11	18	10	2	-	41
		26.83 %	43.90 %	24.39 %	4.88 %	-	100 %
Jumlah		56	84	57	6	2	205
		27.32 %	40.97 %	27.80 %	2.93 %	0.98 %	100 %
Rata-rata		11.2	16.8	11.4	1.2	0.4	41
		27.32 %	40.97 %	27.80 %	2.93 %	0.98 %	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.11 diatas, memberikan gambaran ternyata kebanyakan dari responden yaitu sebanyak 40.97 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan sering menerapkan standar pelaksanaan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, namun ada juga responden yaitu 27.80 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan kadang-kadang menerapkan standar pelaksanaan dalam proses belajar mengajar, ada juga responden yaitu 27.32 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan selalu menerapkan standar pelaksanaan tersebut, selain itu ada juga responden yaitu 2.93 % menilai bahwa Dinas Pendidikan jarang menerapkan standar pelaksanaan dalam proses belajar mengajar, selanjutnya responden yaitu sebanyak 0.98 % menilai bahwa pengawas Dinas pendidikan tidak pernah menerapkan standar pelaksanaan dalam proses belajar mengajar.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar pelaksanaan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Roka Hilir sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.11 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 40.97 % menilai bahwa dalam melakukan pengawasan Dinas pendidikan sering menerapkan standar pelaksanaan dalam proses belajar mengajar siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dengan tolak ukur bahwa :

- a. Pengawas Dinas Pendidikan sering melakukan pembimbingan dan pengarahan kepada guru dalam proses belajar mengajar

- b. Pengawasan yang dilakukan sudah disesuaikan dengan standar pelaksanaan, baik itu dari pusat maupun dari Dinas Pendidikan itu sendiri, artinya bahwa standar pelaksanaan disini sudah dijadikan sebagai patokan dalam melakukan pengawasan.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan adanya berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pengawasan. Oleh karena itu langkah kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Dengan adanya penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan, kita dapat melihat sejauh mana pengawas dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan dalam peroses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat pada tabel 5.12 dibawah ini :

Tabel 5.12 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan pernah memberikan evaluasi atas ketidakefektifan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	6	14.63 %
2	Sering	16	39.02 %
3	Kadang-kadang	15	36.59 %
4	Jarang	2	4.88 %
5	Tidak pernah	2	4.88 %
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.12 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan pernah memberikan evaluasi atas ketidakefektifan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, responden yang menjawab selalu berjumlah 6 orang atau 14.63 %, yang menjawab sering berjumlah 16 orang atau 39.02 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 15 orang atau 36.59 %, yang menjawab jarang berjumlah 2 orang atau 4.88 %, dan yang menjawab tidak pernah berjumlah 2 orang atau 4.88 %.

Berdasarkan tabel 5.12 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi oleh jawaban sering, artinya bahwa pengawas Dinas Pendidikan sering memberikan evaluasi atas ketidakefektifan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Jadi dalam hal ini pernyataan tersebut tergolong kedalam kategori baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai berhasil atau tidaknya guru mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, dapat dilihat pada tabel 5.13 dibawah ini :

Tabel 5.13 : Tanggapan responden mengenai berhasil atau tidaknya guru mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	7	17.07 %
2	Sering	22	53.66 %
3	Kadang-kadang	10	24.39 %
4	Jarang	2	4.88 %
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.13 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai berhasil atau tidaknya guru mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, responden yang menjawab selalu berjumlah 7 orang atau 17.07 %, yang menjawab sering berjumlah 22 orang atau 53.66 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 10 orang atau 24.39 %, yang menjawab jarang berjumlah 2 orang atau 4.88 %, dan tidak ada satupun responden yang menjawab tidak pernah.

Berdasarkan dari tabel 5.13 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban sering, artinya bahwa guru memang sudah berhasil mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi, dalam hal ini pernyataan tersebut tergolong kedalam kategori baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru bagaimana menyampaikan materi pelajaran dengan baik, dapat dilihat pada tabel 5.14 dibawah ini :

Tabel 5.14 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru bagaimana menyampaikan materi pelajaran dengan baik

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	17	41.46 %
2	Sering	10	24.39 %
3	Kadang-kadang	11	26.83 %
4	Jarang	2	4.88 %
5	Tidak pernah	1	2.44 %
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.14 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengawasi, memberi pengarahan atau bimbingan kepada guru bagaimana menyampaikan pelajaran dengan baik, responden yang menjawab selalu berjumlah 17 orang atau 41.46 %, yang menjawab sering berjumlah 10 orang atau 24.39 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 11 orang atau 26.83 %, yang menjawab jarang berjumlah 2 orang atau 4.88 %, dan yang menjawab tidak pernah berjumlah 1 orang atau 2.44 %.

Berdasarkan tabel 5.14 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban selalu, artinya bahwa Dinas Pendidikan selalu mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru bagaimana menyampaikan pelajaran dengan baik. Jadi, dalam hal ini pernyataan tersebut tergolong kedalam kategori sangat baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan melakukan pengawasan selalu disesuaikan dengan standar pengawasan yaitu

minimal dua kali dalam satu bulan setiap satu sekolah, dapat dilihat pada tabel 5.15 dibawah ini :

Tabel 5.15 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan melakukan pengawasan selalu disesuaikan dengan standar pengawasan yaitu minimal dua kali dalam satu bulan setiap satu sekolah

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	9	21.95 %
2	Sering	12	29.27 %
3	Kadang-kadang	16	39.02 %
4	Jarang	2	4.88 %
5	Tidak pernah	2	4.88 %
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.15 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan melakukan pengawasan selalu disesuaikan dengan standar pengawasan yaitu minimal dua kali dalam satu bulan setiap satu sekolah, responden yang menjawab selalu berjumlah 9 orang atau 21.95%, yang menjawab sering berjumlah 12 orang atau 29.27 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 16 orang atau 39.02 %, yang menjawab jarang berjumlah 2 orang atau 4.88 %, dan yang menjawab tidak pernah berjumlah 2 orang atau 4.88 %.

Berdasarkan tabel 5.15 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi oleh jawaban kadang-kadang, artinya bahwa Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan kadang-kadang selalu disesuaikan dengan standar

pengawasan yaitu minimal dua kali dalam satu bulan setiap satu sekolah. Jadi, dalam hal ini pernyataan tersebut tergolong ke dalam kategori cukup baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai apakah dalam melakukan pengukuran kegiatan pengawasan, standar dinas selalu disesuaikan dengan standar pusat, dapat dilihat pada tabel 5.16 dibawah ini :

Tabel 5.16 : Tanggapan responden mengenai apakah dalam melakukan pengukuran kegiatan pengawasan standar dinas selalu disesuaikan dengan standar pusat

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	12	29.27 %
2	Sering	23	56.09 %
3	Kadang-kadang	4	9.76 %
4	Jarang	2	4.88 %
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.16 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah dalam melakukan pengukuran kegiatan pengawasan standar dinas selalu disesuaikan dengan standar pusat, responden yang menjawab selalu berjumlah 12 orang atau 29.27 %, yang menjawab sering berjumlah 23 orang atau 56.09 %, yang menjawab kadang0kadang berjumlah 4 orang atau 9.76 %, yang menjawab jarang berjumlah 2 orang atau 4.88 %, dan tidak ada satupun responden yang menjawab tidak pernah.

Berdasarkan tabel 5.16 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban sering, artinya bahwa pengawas Dinas Pendidikan dalam melakukan pengukuran kegiatan pengawasan standar dinas sering

disesuaikan dengan standar pusat. Jadi, dalam hal ini pernyataan tersebut termasuk kedalam kategori baik.

Selanjutnya untuk mengetahui penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel rekapitulasi 5.17 dibawah ini :

Tabel 5.17 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

No	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	jarang	Tidak pernah	
1	Apakah Dinas Pendidikan pernah memberikan evaluasi atas ketidakefektifan proses belajar mengajar yang diajukan oleh guru	6	16	15	2	2	41
		14.63 %	39.02 %	36.59 %	4.88 %	4.88 %	100 %
2	Apaka guru berhasil mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan	7	22	10	2	-	41
		17.07 %	53.66 %	24.39 %	4.88 %	-	100 %
3	Apakah Dinas Pendidikan mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru bagaimana menyampaikan materi pelajaran dengan baik	17	10	11	2	1	41
		41.46 %	24.39 %	26.83 %	4.88 %	2.44 %	100 %
4	Apakah Dinas Pendidikan melakukan pengawasan selalu disesuaikan dengan standar pengawasan yaitu minimal dua kali dalam satu bulan setiap satu sekolah	9	12	16	2	2	41
		21.95 %	29.27 %	39.02 %	4.88 %	4.88 %	100 %
5	Apakah pengukuran Kegiatan pengawasan, Standar dinas selalu disesuaikan dengan standar pusat	12	23	4	2	-	41
		29.27 %	56.09 %	9.76 %	4.88 %	-	100 %
Jumlah		51	83	56	10	5	205
		24.88 %	40.49 %	27.31 %	4.88 %	2.44 %	100 %
Rata-rata		10.2	16.6	11.2	2	1	41
		24.88 %	40.49 %	27.31 %	4.88 %	2.44 %	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.17 diatas, memberikan jawaban ternyata kebanyakan dari responden yaitu sebanyak 40.49 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan sering menentukan pengukuran pelaksanaan

kegiatan dalam proses belajar mengajar siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Namun dalam hal ini, ada juga responden yaitu sebanyak 27.31 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan kadang-kadang dengan menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ada juga responden yakni sebanyak 24.88 % menilai bahwa pengawas Dinas pendidikan dalam melakukan pengawasan selalu menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, selain itu ada juga responden yaitu sebanyak 4.88 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan jarang menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, selanjutnya responden yaitu sebanyak 2.44 % menilai bahwa pengawas Dinas pendidikan dalam melakukan pengawasan tidak pernah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.17 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 40.49 % menilai bahwa dalam melakukan pengawasan Dinas Pendidikan sering menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dengan tolak ukur bahwa :

- a. Dinas Pendidikan sering memberikan evaluasi atas ketidakefektifan guru dalam melakukan proses belajar mengajar
- b. Guru sudah berhasil mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dalam melakukan proses belajar mengajar

- c. Pengawas Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan sudah disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan yaitu minimal dua kali dalam 1 bulan setiap satu sekolah.

3. Membandingkan Hasil Pengukuran Dengan Standar

Membandingkan hasil pengukuran dengan standar merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi atasan terhadap bawahan.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pembandingan hasil pengukuran dengan standar yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan dalam peroes belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat pada tabel 5.18 dibawah ini :

Tabel 5.18 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan selalu melakukan kegiatan pengawasan dengan standar yang ditetapkan

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	9	21.95 %
2	Sering	17	41.46 %
3	Kadang-kadang	12	29.27 %
4	Jarang	2	4.88 %
5	Tidak pernah	1	2.44 %
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.18 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan selalu melakukan kegiatan pengawasan

dengan standar yang ditetapkan, responden yang menjawab selalu berjumlah 9 orang atau 21.95 %, yang menjawab sering berjumlah 17 orang atau 41.46 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 12 orang atau 29.27 %, yang menjawab jarang berjumlah 2 orang atau 4.88 %, dan yang menjawab tidak pernah berjumlah 1 orang atau 2.44%.

Berdasarkan tabel 5.18 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban sering yaitu dengan jumlah 17 orang atau 41.46 %, artinya bahwa pengawas Dinas Pendidikan sering melakukan kegiatan pengawasan dengan standar yang ditetapkan. Jadi dalam hal ini pernyataan tersebut tergolong kedalam kategori baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan sudah menganut skala pengukuran yang ditetapkan sebagai patokan dalam pengawasan, dapat dilihat pada tabel 5.19 dibawah ini :

Tabel 5.19 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan sudah menganut skala pengukuran yang ditetapkan sebagai patokan dalam pengawasan

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	11	26.83 %
2	Sering	21	51.22 %
3	Kadang-kadang	7	17.07 %
4	Jarang	1	2.44 %
5	Tidak pernah	1	2.44 %
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.19 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan sudah menggunakan skala pengukuran yang

ditetapkan sebagai patokan dalam pengawasan, responden yang menjawab selalu berjumlah 11 orang atau 26.83 %, yang menjawab sering berjumlah 21 orang atau 51.22 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 7 orang atau 17.07 %, yang menjawab jarang berjumlah 1 orang atau 2.44 %, dan yang menjawab tidak pernah berjumlah 1 orang atau 2.44 %.

Berdasarkan tabel 5.19 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban sering yaitu dengan jumlah 21 orang atau 51.22 %, artinya bahwa pengawas Dinas Pendidikan sering menggunakan skala pengukuran yang ditetapkan sebagai patokan dalam pengawasan. Jadi dalam hal ini pernyataan tersebut tergolong kedalam kategori baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan selalu menerapkan skala pengukuran dalam melakukan pengawasan, dapat dilihat pada tabel 5.20 dibawah ini :

Tabel 5.20 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan selalu menerapkan skala pengukuran dalam melakukan pengawasan

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	10	24.39 %
2	Sering	26	63.41 %
3	Kadang-kadang	4	9.76 %
4	Jarang	1	2.44 %
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.20 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan selalu menerapkan skala pengukuran dalam

melakukan pengawasan, responden yang menjawab selalu berjumlah 10 orang atau 24.39 %, yang menjawab sering berjumlah 26 orang atau 63.41 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 4 orang atau 9.76 %, yang menjawab jarang berjumlah 1 orang atau 2.44 %, dan tidak ada satupun responden yang menjawab tidak pernah.

Berdasarkan tabel 5.20 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi oleh jawaban sering yaitu dengan jumlah 26 orang atau 63.41 %, artinya bahwa pengawas Dinas Pendidikan sering menerapkan skala pengukuran dalam melakukan pengawasan. Jadi, dalam hal ini pernyataan tersebut tergolong kedalam kategori baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan selalu melakukan pengawasan langsung dan sekaligus membuat laporan hasil pengawasan, dapat dilihat pada tabel 5.21 dibawah ini :

Tabel 5.21 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan selalu melakukan pengawasan langsung dan sekaligus membuat laporan hasil pengawasan

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	17	41.46 %
2	Sering	13	31.71 %
3	Kadang-kadang	10	24.39 %
4	Jarang	-	-
5	Tidak pernah	1	2.44 %
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.21 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan selalu melakukan pengawasan langsung dan

sekaligus membuat laporan hasil pengawasan, responden yang menjawab selalu berjumlah 17 orang atau 41.46 %, yang menjawab sering berjumlah 13 orang atau 31.71 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 10 orang atau 24.39 %, yang menjawab tidak pernah berjumlah 1 orang atau 2.44 %, dan tidak ada satupun responden yang menjawab jarang.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban selalu yaitu dengan jumlah 17 orang atau 41.46 %, artinya bahwa Dinas Pendidikan selalu melakukan pengawasan langsung dan sekaligus membuat laporan hasil pengawasan. Jadi, dalam hal ini pernyataan tersebut tergolong kedalam kategori sangat baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan sudah optimal, dapat dilihat pada tabel 5.22 dibawah ini :

Tabel 5.22 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan sudah optimal

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	8	19.51 %
2	Sering	19	46.34 %
3	Kadang-kadang	13	31.71 %
4	Jarang	1	2.44 %
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.22 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan sudah optimal,

responden yang menjawab selalu berjumlah 8 orang atau 19.51 %, yang menjawab sering berjumlah 19 orang atau 46.34 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 13 orang atau 31.71 %, yang menjawab jarang berjumlah 1 orang atau 2.44 %, dan tidak ada satupun responden yang menjawab tidak pernah.

Berdasarkan tabel 5.22 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban sering yaitu dengan jumlah 19 orang atau 46.34 %, artinya bahwa dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan sudah optimal. Jadi, dalam hal ini, pernyataan tersebut termasuk kedalam kategori baik.

Selanjutnya untuk mengetahui pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari perbandingan hasil pengukuran dengan standar dapat dilihat pada tabel rekapitulasi 5.23 dibawah ini :

Tabel 5.23 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Membandingkan Hasil Pengukuran Dengan Standar

No	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	jarang	Tidak pernah	
1	Apakah Dinas Pendidikan selalu melakukan kegiatan pengawasan dengan standar yang ditetapkan	9	17	12	2	1	41
		21.95 %	41.46 %	29.27 %	4.88 %	2.44 %	100 %
2	Apakah Dinas Pendidikan sudah menggunakan skala pengukuran yang ditetapkan sebagai patokan dalam pengawasan	11	21	7	1	1	41
		26.82 %	51.22 %	17.07 %	2.44 %	2.44 %	100 %
3	Apakah Dinas Pendidikan selalu menerapkan skala pengukuran dalam melakukan pengawasan	10	26	4	1	-	41
		24.39 %	63.41 %	9.76 %	2.44 %	-	100 %
4	Apakah Dinas Pendidikan selalu melakukan pengawasan langsung dan sekaligus membuat laporan hasil pengawasan	17	13	10	-	1	41
		41.46 %	31.71 %	24.39 %	-	2.44 %	100 %
5	Apakah Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan sudah optimal	8	19	13	1	-	41
		19.51 %	46.34 %	31.71 %	2.44 %	-	100 %
Jumlah		55	96	46	5	3	205
		26.83 %	46.83 %	22.44 %	2.44 %	1.46 %	100 %
Rata-rata		11	19.2	9.2	1	0.6	41
		26.83 %	46.83 %	22.44 %	2.44 %	1.46 %	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.23 diatas, memberikan gambaran ternyata kebanyakan dari responden yaitu sebanyak 46.83 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan

dalam melakukan pengawasan sering melakukan perbandingan antara hasil pengukuran dengan standar, namun ada juga responden yaitu sebanyak 26.83 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan selalu melakukan perbandingan antara hasil pengukuran dengan standar, ada juga responden yaitu 22.44 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan kadang-kadang bahkan jarang melakukan perbandingan antara hasil pengukuran dengan standar, selanjutnya responden yaitu sebanyak 1.46 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan tidak pernah sama sekali melakukan perbandingan antara hasil pengukuran dengan standar.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan hasil pengukuran dengan standar yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.23 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 46.83 % menilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Dinas pendidikan sering membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang telah ditetapkan, dengan tolak ukur bahwa :

- a. Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan sering melakukan perbandingan antara kegiatan yang dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan
- b. Dinas pendidikan melakukan pengawasan langsung ke sekolah minimal dua kali setiap satu sekolah, dan memberikan laporan hasil pengawasan kepada kepala Dinas pendidikan setiap 3 bulan sekali.

D. Pengambilan Korektif

Pengambilan koreksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sehingga perlu diadakannya perbaikan dalam pelaksanaan. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan.

Selanjutnya, untuk mengetahui sampai sejauh mana tanggapan-tanggapan responden mengenai indikator pengambilan korektif yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat pada tabel 5.24 dibawah ini :

Tabel 5.24 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengadakan evaluasi terhadap guru-guru di sekolah

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	8	19.51 %
2	Sering	22	53.66 %
3	Kadang-kadang	10	24.39 %
4	Jarang	1	2.44 %
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.24 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan mengadakan evaluasi terhadap guru-guru di sekolah, responden yang menjawab selalu berjumlah 8 orang atau 19.51 %. Yang menjawab sering berjumlah 22 orang atau 53.66 %, yang menjawab kadang-

kadang berjumlah 10 orang atau 24.39 %, yang menjawab jarang berjumlah 1 orang atau 2.44 %, dan tidak ada satupun responden yang menjawab tidak pernah.

Berdasarkan tabel 5.24 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban sering, artinya bahwa pengawas Dinas Pendidikan sering mengadakan evaluasi terhadap guru-guru di sekolah. Jadi, dalam hal ini pernyataan tersebut termasuk kedalam kategori baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai apakah guru selalu menerima sanksi dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas, dapat dilihat pada tabel 5.25 dibawah ini :

Tabel 5.25 : Tanggapan responden mengenai apakah guru selalu menerima sanksi dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	8	19.51 %
2	Sering	11	26.83 %
3	Kadang-kadang	15	36.59 %
4	Jarang	5	12.19 %
5	Tidak pernah	2	4.88 %
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.25 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah guru selalu menerima sanksi dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas, responden yang menjawab selalu berjumlah 8 orang atau 19.51 %, yang menjawab sering berjumlah 11 orang atau 26.83 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 15 orang atau 36.59 %, yang menjawab

jarang berjumlah 5 orang atau 12.19%, dan yang menjawab tidak pernah berjumlah 2 orang atau 4.88%.

Berdasarkan tabel 5.25 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban kadang-kadang, artinya bahwa guru tidak selalu menerima sanksi dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas. Jadi dalam hal ini, pernyataan tersebut tergolong kedalam kategori cukup baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai Apakah Dinas Pendidikan selalu menegur guru yang tidak serius dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa dalam proses belajar mengajar, dapat dilihat pada tabel 5.26 dibawah ini :

Tabel 5.26 : Tanggapan responden mengenai apakah guru selalu menerima sanksi dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	10	24.39 %
2	Sering	23	56.09 %
3	Kadang-kadang	6	14.64 %
4	Jarang	-	-
5	Tidak pernah	2	4.88 %
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.26 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah guru selalu menerima sanksi dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas, responden yang menjawab selalu berjumlah 10 orang atau 24.39 %, yang menjawab sering berjumlah 23 orang atau 56.09 %, yang menjawab kadang-kadang berjumlah 6 orang atau 14.64 %, yang menjawab tidak pernah

berjumlah 2 orang atau 4.88 %, dan tidak ada satupun responden yang menjawab jarang.

Berdasarkan tabel 5.26 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban sering yaitu dengan jumlah 23 orang atau 56.09 %, artinya bahwa guru sering menerima sanksi dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas. Jadi dalam hal ini, pernyataan tersebut tergolong kedalam kategori baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai Apakah Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan memberikan koreksi langsung kepada guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, dapat dilihat pada tabel 5.27 dibawah ini :

Tabel 5.27 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan memberikan koreksi langsung kepada guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	5	12.19 %
2	Sering	22	53.66 %
3	Kadang-kadang	11	26.83 %
4	Jarang	3	7.32 %
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.27 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan memberikan koreksi langsung kepada guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, responden yang menjawab selalu berjumlah 5 orang atau 12.19 %, yang menjawab sering berjumlah 22 orang atau 53.66 %, yang menjawab kadang-

kadang berjumlah 11 orang atau 26.83 %, yang menjawab jarang berjumlah 3 orang atau 7.32 %, dan tidak ada satupun responden yang menjawab tidak pernah.

Berdasarkan tabel 5.27 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban sering yaitu dengan jumlah 22 orang atau 53.66 %, artinya bahwa Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan sering memberikan koreksi langsung kepada guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi, dalam hal ini pernyataan tersebut tergolong kedalam kategori baik.

Kemudian tanggapan responden mengenai Apakah Dinas Pendidikan dalam pengambilan korektif itu secara objektif, dapat dilihat pada tabel 5.28 dibawah ini :

Tabel 5.28 : Tanggapan responden mengenai apakah Dinas Pendidikan dalam pengambilan korektif itu secara objektif

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Selalu	6	14.64 %
2	Sering	23	56.09 %
3	Kadang-kadang	9	21.95 %
4	Jarang	3	7.32 %
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		41	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.28 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah Dinas Pendidikan dalam pengambilan korektif itu secara objektif, responden yang menjawab selalu berjumlah 6 orang atau 14.64 %, yang menjawab sering berjumlah 23 orang atau 56.09 %, yang menjawab kadang-

kadang berjumlah 9 orang atau 21.95 %, yang menjawab jarang berjumlah 3 orang atau 7.32 %, dan tidak ada satupun responden yang menjawab tidak pernah.

Berdasarkan tabel 5.28 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban sering yaitu dengan jumlah 23 orang atau 56.09 %, artinya bahwa Dinas Pendidikan dalam pengambilan korektif itu sering dilakukan secara objektif. Jadi, dalam hal ini pernyataan tersebut tergolong kedalam kategori baik.

Selanjutnya untuk mengetahui pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari pengambilan korektif dapat dilihat pada tabel rekapitulasi 5.29 dibawah ini :

Tabel 5.29 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pengambilan Korektif

No	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	jarang	Tidak pernah	
1	Apakah Dinas Pendidikan mengadakan evaluasi terhadap guru-guru di sekolah	8	22	10	1	-	41
		19.51 %	53.66 %	24.39 %	2.44 %	-	100 %
2	Apakah guru selalu menerima sanksi dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas	8	11	15	5	2	41
		19.51 %	26.83 %	36.59 %	12.19 %	4.88 %	100 %
3	Apakah Dinas Pendidikan selalu menegur guru yang tidak serius dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa dalam proses belajar mengajar	10	23	6	-	2	41
		24.39 %	56.09 %	14.64 %	-	4.88 %	100 %
4	Apakah Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan memberikan koreksi langsung kepada guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar	5	22	11	3	-	41
		12.19 %	53.66 %	26.83 %	7.32 %	-	100 %
5	Apakah Dinas Pendidikan dalam pengambilan korektif itu secara objektif	6	23	9	3	-	41
		14.64 %	56.09 %	21.95 %	7.32 %	-	100 %
Jumlah		37	101	51	12	4	205
		18.05 %	49.27 %	24.88 %	5.85 %	1.95 %	100 %
Rata-rata		7.4	20.2	10.2	2.4	0.8	41
		18.05 %	49.27 %	24.88 %	5.85	1.95 %	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.29 diatas, memberikan jawaban ternyata dari responden yaitu sebanyak 49.27 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan sering melakukan tindakan korektif dalam melaksanakan pengawasan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Namun ada juga responden yaitu 24.88 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan kadang-kadang melakukan tindakan korektif dalam melaksanakan pengawasan, ada juga responden yaitu sebanyak 18.05 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan selalu melakukan tindakan korektif dalam melakukan pengawasan, selain itu ada juga responden yaitu 5.85 % menilai bahwa pengawas dinas Pendidikan jarang melakukan tindakan korektif dalam melakukan pengawasan, selanjutnya responden yaitu 1.95 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan tidak pernah melakukan tindakan korektif dalam melakukan pengawasan.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan korektif yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.29 yang ternyata kebanyakan dari responden yaitu 49.27 %, menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan sering melakukan pengambilan korektif dalam proses belajar mengajar. Sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat segera dibenahi oleh pengawas Dinas Pendidikan, dengan tolak ukur bahwa :

- a. Pengawas Dinas Pendidikan sering melakukan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap guru-guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar

- b. Dinas Pendidikan sering menegur guru yang tidak serius dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa khususnya mata pelajaran yang diujikan nasionalkan.

5.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pengawasan Dinas Pendidikan Dalam Proses Belajar Mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Dari beberapa uraian tabel sebelumnya mengenai tanggapan responden terhadap pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan bangko kabupaten rokan Hilir yang terdiri dari :

1. Tanggapan responden terhadap penerapan standar pelaksanaan yaitu :
 - a. Apakah Dinas Pendidikan aktif mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru dalam melakukan proses belajar mengajar siswa didalam kelas ?
 - b. Apakah Dinas Pendidikan selalu mengarahkan guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ?
 - c. Apakah Dinas Pendidikan mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru ?
 - d. Apakah pengawas melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan ?
 - e. Apakah Dinas pendidikan menerapkan standar pelaksanaan pengawasan dengan baik dalam melakukan pengawasan ?

2. Tanggapan responden terhadap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - a. Apakah Dinas Pendidikan pernah memberikan evaluasi atas ketidakefektifan proses belajar mengajar yang diajukan oleh guru ?
 - b. Apakah guru berhasil mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan ?
 - c. Apakah Dinas Pendidikan mengawasi, memberi pengarahan, atau bimbingan kepada guru bagaimana menyampaikan materi pelajaran dengan baik ?
 - d. Apakah Dinas Pendidikan melakukan pengawasan selalu disesuaikan dengan standar pengawasan yaitu minimal dua kali dalam satu bulan setiap satu sekolah ?
 - e. Apakah dalam melakukan pengukuran kegiatan pengawasan, standar dinas selalu disesuaikan dengan standar pusat ?
3. Tanggapan responden terhadap perbandingan hasil pengukuran dengan standar yaitu :
 - a. Apakah Dinas Pendidikan selalu melakukan kegiatan pengawasan dengan standar yang ditetapkan ?
 - b. Apakah Dinas Pendidikan sudah menggunakan skala pengukuran yang ditetapkan sebagai patokan dalam pengawasan ?
 - c. Apakah Dinas Pendidikan selalu menerapkan skala pengukuran dalam melakukan pengawasan ?

- d. Apakah Dinas Pendidikan selalu melakukan pengawasan langsung dan sekaligus membuat laporan hasil pengawasan ?
 - e. Apakah Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan sudah optimal ?
4. Tanggapan responden terhadap pengambilan tindakan korektif yaitu :
- a. Apakah Dinas Pendidikan mengadakan evaluasi terhadap guru-guru di sekolah ?
 - b. Apakah guru selalu menerima sanksi dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas ?
 - c. Apakah Dinas Pendidikan selalu menegur guru yang tidak serius dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa dalam proses belajar mengajar?
 - d. Apakah Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan memberikan koreksi langsung kepada guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar ?
 - e. Apakah Dinas Pendidikan dalam pengambilan korektif itu secara objektif?

Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi 5.30 jawaban responden tentang pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dibawah ini :

Tabel 5.30 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Pengukuran					Jumlah
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	jarang	Tidak pernah	
1	Penerapan standar pelaksanaan	56	84	57	6	2	205
		27.32 %	40.97 %	27.80 %	2.93 %	0.98 %	100 %
2	Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	51	83	56	10	5	205
		24.88 %	40.49 %	27.31 %	4.88 %	2.44 %	100 %
3	Membandingkan hasil pengukuran dengan standar	55	96	46	5	3	205
		26.83 %	46.83 %	22.44 %	2.44 %	1.46 %	100 %
4	Pengambilan korektif	37	101	51	12	4	205
		18.05 %	49.27 %	24.88 %	5.85 %	1.95 %	100 %
Jumlah		199	364	210	33	14	820
		24.27 %	44.39 %	25.61 %	4.02 %	1.71 %	100 %
Rata-rata		9.95	18.2	10.5	1.65	0.7	41
		24.27 %	44.39 %	25.61 %	4.02 %	1.71 %	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tabel 5.30 di atas tentang rekapitulasi tanggapan responden terhadap pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, ternyata kebanyakan responden yaitu 44,39 % menilai bahwa pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sudah sering dilakukan, bahkan ada juga responden yaitu 25,61 % menilai bahwa

pengawas Dinas Pendidikan kadang-kadang melakukan pengawasan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, namun masih ada responden yaitu 24,27 % yang menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan selalu melakukan pengawasan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bahkan ada juga responden yaitu 4,02 % menilai bahwa Dinas Pendidikan jarang melakukan pengawasan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan ada juga responden yaitu 1,71 % menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan tidak pernah melakukan pengawasan terhadap Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kebanyakan dari responden menilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sudah baik. Sebab dilihat pada tabel 5.30 kebanyakan dari responden menilai bahwa pengawas Dinas Pendidikan sering melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah, khususnya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sesuai dengan tujuan Dinas Pendidikan yaitu berupaya untuk pencapaian tujuan pendidikan melalui profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2003 pasal 39 yaitu merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan survei lapangan dan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Drs Zulkifli mengatakan bahwasannya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir itu sangat berpengaruh terhadap prosentase tingkat kelulusan siswa khususnya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang ada di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dapat dilihat dari tingkat prosentase kelulusan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasikan dari jawaban responden mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : berdasarkan pengukuran empat indikator yang telah dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang mengacu pada keempat indikator tersebut bahwa pengawas Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap Sekolah Lajutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sudah menerapkan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, membandingkan hasil pengukuran dengan standar, dan pengambilan tindakan korektif.

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban responden mengenai hubungan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap prosentase kelulusan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kelulusan siswa, khususnya pada siswa Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan siswa dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

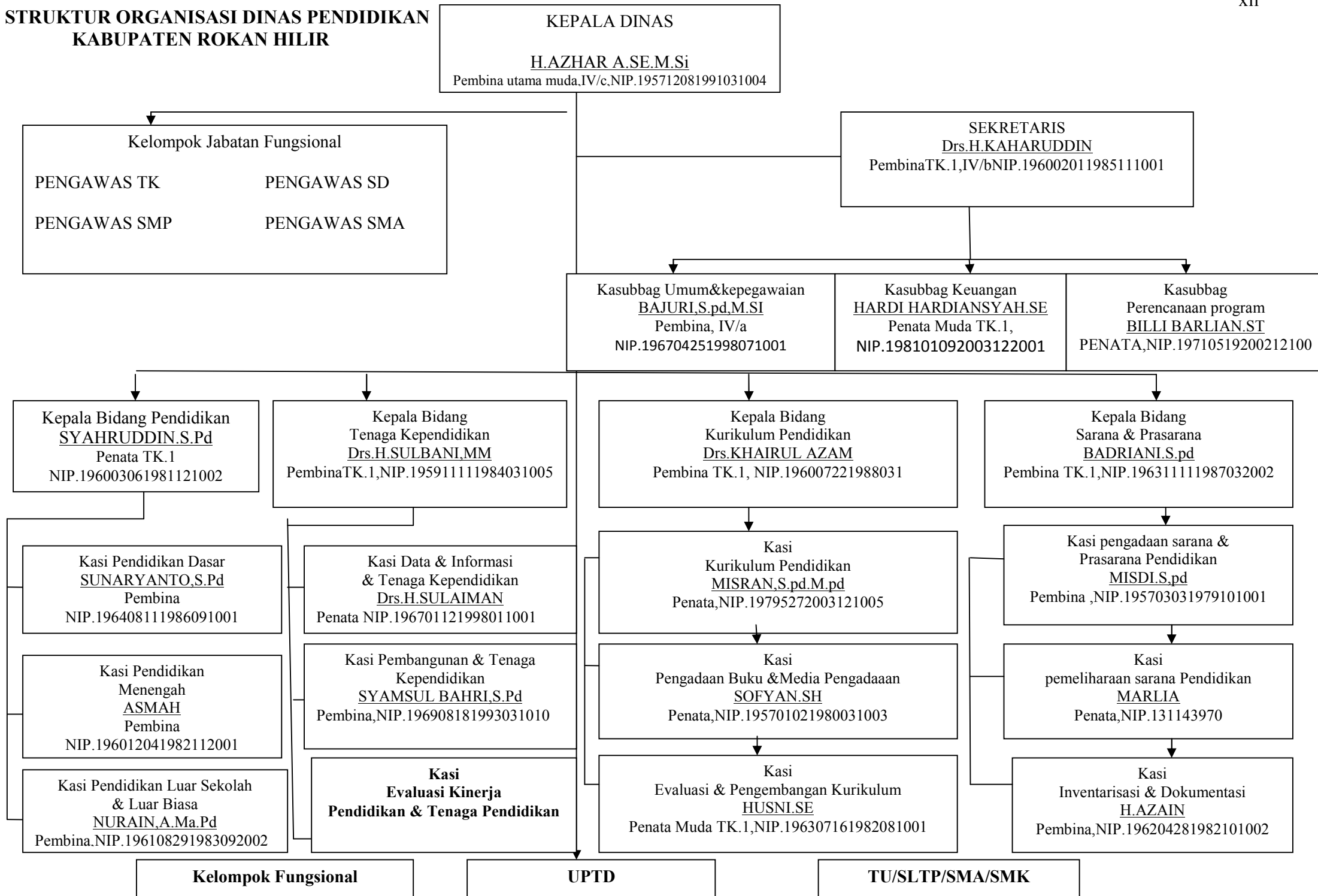
6.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir demi tercapainya tujuan pengawasan yang efektif, adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Demi tercapainya pengawasan yang efektif, diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir mengusahakan pengawasan dengan melakukan langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang telah ditetapkan, seperti menerapkan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, membandingkan hasil pengukuran dengan standar, dan pengambilan tindakan korektif.
2. Diharapkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, dalam melakukan pengawasan harus dilakukan secara langsung oleh pengawas Dinas Pendidikan, agar apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses belajar mengajar, maka Dinas Pendidikan harus dengan tegas dapat mengatasinya. Kemudian pengawasan harus dilakukan secara rutin agar dapat merubah suatu organisasi dari yang baik menjadi lebih baik lagi.

3. Diharapkan kepada pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pengawasan terhadap proses belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir harus tepat dan terarah. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengawasan yang baik dengan memperhatikan langkah-langkah pelaksanaan pengawasan seperti menerapkan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, membandingkan hasil pengukuran dengan standar, dan pengambilan tindakan korektif.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR



DAFTAR PUSTAKA

- Bahori, H. (1992). *"Pengawasan Negara"*. Raja Wali Perss: Jakarta.
- Depdiknas. 2003. *"Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003"*. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah: Jakarta.
- E. Mulyasa. 2004. *"Manajemen Berbasis Sekolah"*. PT. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Hadyaningrat, Soewarno. 1989. *"Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen"*. CV Masagung: Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 1984. *"Manajemen"* Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Herujito. 2002. *"Dasar-Dasar Manajemen"*. Rineka Cipta: Jakarta
- Herujito, M. Yayat. (2011). *"Dasar-Dasar Manajemen"*. Grasindo: Jakarta
- Kartini Kartono. 2002. *"Pimpinan dan Kepemimpinan"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mode, Pidarta. 2004. *"Manajemen Pendidikan Indonesia"*. PT. Remaja Rosda Karya: Jakarta.
- Moleong, Levy J. 2000. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Siagian, S.P. 2006. *"Filsafat Administrasi"*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2004. *"Manajemen Strategik"*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiono. 1997. *"Metodologi Penelitian Administrasi"*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiono, 2010. *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D"*. Alfabeta: Bandung
- Syafaruddin. 2005. *"Manajemen Lembaga Pendidikan Islam"*. PT Ciputat Press: Jakarta.
- Terry G.R. dan Rue L.W. (1996). *"Dasar-Dasar Manajemen"*. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta

Winardi. (2003). *“Azas-Azas Manajemen”. Terjemahan dari Principle Of Manajemen*”. George R. Terry. Alumni Bandung

Tafsir Ibnu Katsir QS. An-Nisa ayat 58

Tafsir Ibnu katsir QS. Al Fajr, 89:14

Tafsir Ibnu Katsir QS. Al-Mukmin ayat 19